



RANCANGAN/LAPORAN AKTUALISASI

**OPTIMALISASI KARYA TULIS ILMIAH DALAM RANGKA EFEKTIVITAS
DIPLOMASI PARLEMEN**

Disusun Oleh:

Nama : Ziyad Falahi S Hub.Int M Si

NIP : 198810282019031001

Instansi : Setjen dan BK DPR RI

**PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN III
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

2019



LEMBAR PERSETUJUAN
RANCANGAN AKTUALISASI

OPTIMALISASI KARYA TULIS ILMIAH DALAM RANGKA EFEKTIVITAS
DIPLOMASI PARLEMEN

Disusun Oleh:

Nama : Ziyad Falahi S, Hub.Int M Si
NIP : 198810282019031001
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian DPR RI

Peserta Diklat,

Ziyad Falahi M.Si
Menyetujui

Mentor,

Dr. Humphrey Wangke M.Si
NIP.196105121990031003

Coach,

Agus Supriyono, S.S., M.A.P
NIP. 196902082003121003

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. DASAR HUKUM.....	2
PROFIL ORGANISASI.....	3
A. VISI DAN MISI.....	3
B. STRUKTUR ORGANISASI.....	3
C. PENJELASAN TUGAS DAN FUNGSI.....	4
RANCANGAN AKTUALISASI.....	9
A. IDENTIFIKASI ISU	9
B. PEMILIHAN ISU PRIORITAS	16
C. GAGASAN PEMECAHAN ISU.....	18
D. RANCANGAN AKTUALISASI.....	19
PELAKSANAAN AKTUALISASI.....	25
A. PENJELASAN PELAKSANAAN.....	25
B. STAKEHOLDER.....	47
C. KENDALA DAN STRATEGI MENGATASI.....	48
D. ANALISIS DAMPAK	48
E. JADWAL KEGIATAN.....	52
KESIMPULAN.....	53

DAFTAR TABEL

A.	Tabel Matrik Isu Prioritas Teknik USG.....	16
B.	Tabel Kegiatan.....	18
C.	Tabel Kegiatan Pertama.....	24
D.	Nilai nilai kegiatan Pertama.....	28
E.	Tabel kegiatan kedua.....	31
F.	Nilai nilai kegiatan kedua.....	35
G.	Tabel kegiatan ketiga	36
H.	Nilai nilai kegiatan ketiga.....	38
I.	Tabel kegiatan keempat	39
J.	Nilai nilai kegiatan keempat.....	42
K.	Tabel kegiatan kelima.....	43
L.	Nilai nilai kegiatan kelima.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Pusat Penelitian.....	4
Gambar 4.1	Diskusi dengan Mentor.....	25
Gambar 4.2	Konsultasi dengan Mentor.....	26
Gambar 4.3	Diskusi dengan BKSAP.....	29
Gambar 4.4	Mencari Bahan di BKSAP.....	30
Gambar 4.5	Pengumuman Diskusi timur tengah.....	32
Gambar 4.6	Diskusi Timur Tengah.....	33
Gambar 4.7	Diskusi dengan Peneliti HI.....	37
Gambar 4.8	Coaching.....	37
Gambar 4.9	Presentasi Output.....	44
Gambar 4.10	Konsultasi akhir dengan Kepala Pusat.....	45

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan Aktualisasi yang berjudul: "Optimalisasi karya tulis ilmiah dalam rangka efektifitas diplomasi parlemen". Penyusunan laporan hasil Aktualisasi ini dibuat tidak terlepas dari berbagai hambatan dan melalui perjuangan yang berat, berbagai macam dukungan dan bantuan yang diberikan membuat penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan Aktualisasi ini. Tentunya penyusunan Rancangan Aktualisasi ini tidak luput dari berbagai kekurangan sehingga kritikan dan saran pembaca sangat membantu penulis dalam memperbaiki kekurangan penyusunan laporan Aktualisasi ini.

Ucapan rasa terimakasih yang setulusnya penulis ucapkan bagi segala pihak yang turut membantu dalam kelancaran penulisan laporan aktualisasi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan kegiatan aktualisasi ini, ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Dr. Indra Pahlevi M.Si., selaku kepala pusat penelitian yang telah memberikan dukungan dan support dalam terlaksananya program aktualisasi ini
2. Bapak Dr. Humphrey Wangke M.Si., sebagai mentor yang dengan sabar telah memberikan nasehat dan arahan yang sangat membantu dalam penyelesaian rancangan aktualisasi.
3. Bapak Agus Supriyono, S.S., M.A.P sebagai coach yang memberikan arahan dan bimbingannya terkait penyusunan Rancangan aktualisasi

4. Seluruh Senior dan rekan sejawat yang ada di pusat penelitian yang telah mendukung pembuatan rancangan aktualisasi.

Dalam penyusunannya laporan kegiatan aktualisasi ini tentunya tidak luput dari kekurangan dan ketidaksempurnaan, dikarenakan keterbatasan penulis. Sehingga kritik dan saran sangat membantu dalam memperbaiki dan penyempurnaan laporan aktualisasi ini. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungannya.

Bogor, 10 Oktober 2019

Penulis

Ziyad Falahi, S.Hub. Int., M.Si.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan merujuk pada ketentuan Pasal 63 ayat (3) dan ayat (4) UU ASN, CPNS wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.

Diperlukan sebuah penyelenggaraan Pelatihan yang inovatif dan terintegrasi, yaitu penyelenggaraan pelatihan yang memadukan pembelajaran klasikal dan nonklasikal di tempat pelatihan dan di tempat kerja, sehingga memungkinkan peserta mampu menginternalisasi, menerapkan, dan mengaktualisasikan, serta membuatnya menjadi kebiasaan (habitiasi), dan merasakan manfaatnya, sehingga terpatni dalam dirinya sebagai karakter PNS yang profesional sesuai bidang tugas. Melalui pembaharuan Pelatihan tersebut, diharapkan dapat menghasilkan PNS profesional yang berkarakter dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa.

. PNS sebagai pelayan masyarakat yang mempunyai peranan penting dalam proses pelayanan publik dalam masyarakat, merupakan aset negara yang perlu dikembang potensi dan kemampuannya. Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan desain diklat yang tepat bagi CPNS sebagai awal pembentukan karakter dan kompetensi sesuai tuntutan jabatannya.

Berdasarkan hal di atas, penyempurnaan dan pengayaan konsep Diklat Prajabatan dilakukan dengan mengembangkan desain Diklat terintegrasi

sejalan dengan perkembangan dinamika tuntutan jabatan dan penguatan terhadap kompetensi bidang sesuai dengan formasi jabatan yang ditetapkan. Nomenklatur Diklat Prajabatan diubah menjadi Pelatihan Dasar CPNS, sebagai salah satu jenis Pelatihan yang strategis pasca UU ASN dalam rangka pembentukan karakter PNS dan membentuk kemampuan bersikap dan bertindak profesional mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial kultural dengan menggunakan perspektif *whole of government* yang didasari nilai-nilai dasar PNS berdasarkan kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada setiap pelaksanaan tugas jabatannya sebagai pelayan masyarakat sebagai wujud nyata bela negara seorang PNS.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
5. Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016;
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil

BAB II

PROFIL ORGANISASI

A. VISI DAN MISI PUSAT PENELITIAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Pusat penelitian badan keahlian DPR RI merupakan organisasi yang keberadaannya berfungsi mendukung kinerja anggota Dewan, bersama dengan bidang keahlian lainnya yaitu Pusat Perancangan Undang-Undang, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Pusat Kajian Anggaran, dan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara. Adapun visi dari Pusat Penelitian adalah **“Menjadi Pusat Penelitian yang profesional, netral, andal dan akuntabel dalam mendukung terwujudnya parlemen modern.”**

Untuk mewujudkan visi yang telah disepakati, diperlukan cara atau misi untuk mencapai visi tersebut. Berikut misi dari pusat penelitian badan keahlian DPR RI adalah:

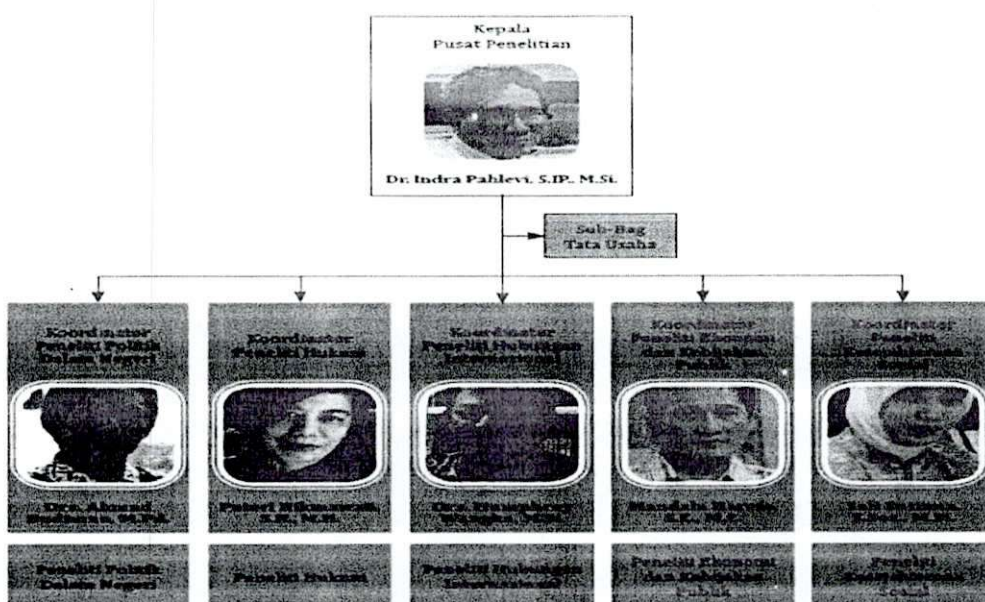
1. Mengoptimalkan dukungan keahlian melalui kegiatan penelitian yang profesional, netral dan akuntabel.
2. Memberikan dukungan keahlian melalui kegiatan pengkajian yang profesional, netral dan akuntabel.
3. Melakukan pengembangan kepakaran dan kompetensi SDM yang andal.

B. Struktur Organisasi

Pusat penelitian badan keahlian DPR RI memiliki peneliti sebanyak 81 Peneliti yang tidak hanya bertugas di Pusat Penelitian tetapi juga membantu tugas Pusat-pusat lainnya yang ada di Badan Keahlian DPR RI. Peneliti di BK DPRRI dibagi dalam bidang yaitu bidang hukum, Hubungan Internasional, Kesejahteraan Sosial, Politik Dalam Negeri dan Ekonomi dan Kebijakan Publik.

Setiap peneliti memiliki kepakaran masing-masing sesuai dengan pembedangannya.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pusat Penelitian



C. PENJELASAN TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan peraturan Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretariat Jenderal No. 2 Tahun 2016, maka Pusat Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penelitian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Penelitian;
- b. Perumusan evaluasi program kerja tahunan Pusat Penelitian;
- c. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat Penelitian;
- d. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pusat Penelitian;
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan pengkajian dan penelitian;
- f. Pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan penelitian;
- g. Pelaksanaan dukungan evaluasi penelitian;
- h. Pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penelitian;
- i. Pelaksanaan tata usaha penelitian;
- j. Penyusunan laporan kinerja Pusat Penelitian;
- k. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian.

Peneliti di BK DPR RI bekerja sesuai kompetensinya dengan berpedoman pada Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Perka LIPI) Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti. Definisi peneliti berdasarkan Perka LIPI Nomor 14 tahun 2018 adalah Pejabat Fungsional Peneliti, yang selanjutnya disebut Peneliti, merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas teknis penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian Instansi Pemerintah. Kedudukan peneliti sebagai pelaksana teknis dalam melakukan kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Instansi Pemerintah.

Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti merupakan Jabatan Fungsional Kategori Keahlian yang memiliki Jenjang Jabatan, Pangkat, dan Golongan Ruang sebagai berikut:

Jenjang Jabatan.

Jenjang Jabatan Fungsional Peneliti dari jenjang terendah sampai dengan tertinggi, terdiri atas:

- a. Peneliti Ahli Pertama;
- b. Peneliti Ahli Muda;
- c. Peneliti Ahli Madya; dan
- d. Peneliti Ahli Utama

Untuk itu, Sasaran Kinerja Pegawai CPNS peneliti ahli pertama diantaranya adalah:

- a. Penulisan Bunga Rampai (angka kredit 10)
- b. Penulisan artikel di Media cetak, elektronik dan media massa (angka Kredit 2)
- c. Mengerjakan perintah atasan. (angka kredit 0,5)

Adapun kegiatan yang telah diikuti oleh calon peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Mengikuti proses penulisan buku bunga rampai

Buku bunga rampai merupakan buku yang ditulis oleh beberapa orang dengan mengambil topik yang sama dengan judul dan pembahasan yang berbeda. Dalam pembagian tugas penulisan, pembahasan yang ditulis setiap peneliti akan berbeda. Pada bulan April, pada tahap awal, saya mendapat tugas membaca dan mengoreksi buku bunga rampai yang ditulis oleh para senior untuk mengetahui proses penulisan hingga pencetakannya. Buku bunga rampai dibuat setahun sekali yang direncanakan naik cetak sekitar bulan September.

Dalam Bidang Hubungan Internasional, terdapat dua kelompok konsentrasi penelitian yaitu *traditional issues* (politik dan keamanan) dan *non-traditional issues*. Para peneliti bidang hubungan internasional karena terbagi kedalam dua pilihan konsentrasi tersebut sesuai dengan minat masing-masing peneliti. Pada tahun ini, saya dilibatkan dalam penulisan bunga rampai yang berkaitan dengan tujuan ke-16 dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu tentang *peace and security* yang masuk dalam kategori *non-traditional issue*.

DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) SDGs di Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) yang beranggotakan para anggota Dewan lintas fraksi dan lintas komisi. Pembentukan Panja SDGs ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran anggota parlemen terhadap SDGs dan diharapkan panja SDGs dapat menjadi ajang diplomasi parlemen serta focal point DPRRI dalam berbagai kerja sama internasional mengenai SDGs.

Para pejabat dan Tenaga Ahli di Biro KSAP, bersama-sama dengan anggota Panja SDGs, telah melakukan serangkaian kunjungan kerja keluar negeri maupun ke daerah untuk melakukan observasi tentang implementasi SDGs di negara lain dan implementasi SDGs di tanah air. Sedangkan Peneliti melakukan kunjungan kerja ke daerah dalam rangka penelitian untuk memperoleh data tentang praktik SDGs yang dilakukan oleh pemerintah setempat.

- b. Rapat membahas seleksi karya tulis ilmiah yang layak muat di Jurnal Politika yang berbasis Open Journal System (OJS).

Keterlibatan lainnya adalah mengikuti rapat-rapat tentang penerbitan Jurnal Politika terutama yang berkaitan dengan tentang manajemen OJS (*Open Journal System*) pada tanggal 7 April 2019. Rapat tersebut diadakan dengan mengundang pembicara dari Pusat

Data dan Informasi LIPI dalam rangka memberi Informasi tentang teknik manajemen jurnal OJS.

Jurnal *Politica* dikelola secara bersama-sama oleh peneliti dari bidang hubungan internasional dan politik dalam negeri dengan ketua Dr Humphrey Wangke. Jurnal *Politica* berbasis OJS pertama kali *launching* dengan mengadakan "call for paper" pada tanggal 1 Juli 2019 untuk penerbitan bulan November 2019.

c. Mengikuti Diskusi

Kegiatan lain yang pernah saya ikuti dalam rangka peningkatan kompetensi keilmuan antara lain dengan mengikuti diskusi yang membahas proposal kelompok penelitian bidang Hubungan Internasional. Selain itu, saya juga mengikuti diskusi yang diadakan oleh kelompok Politik Dalam Negeri ketika membahas kesejahteraan ASN, serta mengundang Prof Firman Noor untuk mengisi diskusi terkait hasil pemilu 2019.

Saya juga mengikuti berbagai acara yang diadakan oleh bidang penelitian lainnya seperti *Focus Group Discussion* (FGD) tentang Implementasi Reformasi DPR RI yang diketuai oleh Fahri Hamzah, maupun peluncuran "Catatan Kritis dari Senayan" oleh Fahri Hamzah dan "Strengthening The Indonesian Parliamentary Diplomacy" oleh Fadli Zon. Kegiatan lainnya adalah mengikuti diskusi yang diadakan oleh Pusat Perancangan Undang Undang terkait dengan *Open Parliament*.

Saya mengikuti FGD terkait kesiapan Indonesia dalam menghadapi SDGs yang diadakan oleh BKSAP 24 juni 2019 dengan mengundang Direktorat Jendral Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri dan Bappenas sebagai narasumber. Sedangkan pada tanggal 10 Juli 2019, saya ditunjuk oleh Korbid Hubungan Internasional untuk mengikuti acara *Bibliobattle* yang diselenggarakan oleh perpustakaan.

BAB III RANCANGAN AKTUALISASI

A. IDENTIFIKASI ISU

Diplomasi adalah seni dan praktik bernegosiasi oleh seseorang (disebut diplomat) yang biasanya mewakili sebuah negara atau organisasi. Kata diplomasi sendiri biasanya langsung terkait dengan diplomasi internasional yang biasanya mengurus berbagai hal seperti budaya, ekonomi, dan perdagangan.

Arti diplomasi dapat juga didefinisikan sebagai cara untuk menyampaikan suatu pesan yang punya tujuan khusus melalui seorang diplomat dalam perundingan. Diplomasi sangat erat hubungannya dalam kegiatan politik luar negeri atau hubungan internasional dengan negara lain.

Kegiatan diplomasi dapat dilakukan dengan negara tertentu saja (bilateral) atau bisa juga dilakukan dengan banyak negara (multilateral). Pada pelaksanaannya, diplomasi bertujuan untuk menjalin, mempererat, dan meningkatkan hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya demi mencapai tujuan bersama.

Peran diplomasi DPR diatur didalam Tatib Bab XIV pasal 219 ayat 1: *DPR ikut berperan serta dalam upaya diplomasi dengan mendukung upaya pelaksanaan politik luar negeri pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undang.*

Peran diplomasi dilakukan dalam bentuk kunjungan kerja sebagai bentuk komunikasi politik anggota parlemen antarbangsa. Alat kelengkapan yang secara khusus melakukan peran diplomasi adalah Biro KSAP.

BKSAP diberi mandat oleh UU MD3 dalam kerangka representasi rakyat dan mendukung pemerintah melaksanakan politik luar

negeri, sekaligus juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja politik luar negeri pemerintah.

Pasal 116 (1) UU no 17 tahun 2014 tentang MD3 menyebutkan bahwa BKSAP bertugas:

1. membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen negara lain;
2. menerima kunjungan delegasi parlemen negara lain yang menjadi tamu DPR;
3. mengoordinasikan kunjungan kerja alat kelengkapan DPR ke luar negeri; dan
4. memberikan saran atau usul kepada pimpinan DPR tentang masalah kerja sama antarparlemen.

Bidang kerja sama: internasional seperti IPU, regional seperti AIPA, bilateral dengan 59 negara. Melalui forum-forum ini, DPR memperjuangkan kepentingan Indonesia di dunia internasional.

Meskipun diplomasi yang dijalankan DPR bersifat second track tetapi diplomasi parlemen justru berkembang pesat, karena bukan hanya menjalankan diplomasi *parliament to parliament* tetapi juga membuka ruang komunikasi antara parlemen dengan kalangan pengusaha, universitas, dan LSM.

Tantangan global telah menarik parlemen untuk aktif berpartisipasi dalam kancah hubungan internasional. Diplomasi DPR dilakukan bukan hanya meningkatkan kerja sama antara negara tetapi juga memperkuat politik luar negeri Indonesia dan untuk mengangkat citra Indonesia di luar negeri.

Peran parlemen tidak hanya sebagai pelengkap diplomasi yang dijalankan pihak eksekutif. Secara faktual, keterlibatan parlemen dalam berbagai peluang kerja sama internasional merupakan keharusan. Diplomasi parlemen Indonesia perlu dioptimalkan untuk mendukung diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia. Keduanya harus saling mengisi dalam menyukseskan diplomasi bangsa, terutama di berbagai prioritas seperti diplomasi menjaga kedaulatan bangsa, diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan warga negara ataupun misalnya diplomasi dalam merealisasikan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia, SDGs dll.

Partisipasi aktif anggota parlemen Indonesia dalam berbagai forum kerjasama regional dan internasional akan memperkaya pengetahuan dan mempelajari best practice negara lain. Kondisi semacam ini dengan sendirinya akan membantu legislator saat bekerja sama dengan mitra di kementerian yang mengurus diplomasi dalam rangka pembentukan UU.

Saat ini, DPR RI telah memiliki *friendship group* atau grup kerjasama bilateral (GKSB) berjumlah 38 parlemen negara. Rencananya, akan ditambahkan menjadi 60 karena banyaknya minat parlemen negara lain untuk bergabung. Grup kerjasama bilateral umumnya membicarakan isu-isu khusus dan persiapan untuk mengikuti forum multilateral.

Mengingat semakin kompleks dinamika diplomasi parlemen, maka Biro KSAP mendapat tugas menjalankan fungsi administrasi dalam mendukung dan menyukseskan setiap misi diplomasi yang dijalankan oleh DPRRI. Seiring dengan semakin banyaknya agenda kerjasama dan forum internasional yang diikuti perlu diikuti oleh anggota DPRRI maka Biro KSAP dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya adalah bagian kerjasama bilateral, dan bagian organisasi internasional dan multilateral.

Untuk menyukseskan misi diplomasi DPRRI ke luar negeri maka Biro KSAP juga dilengkapi dengan tenaga ahli (TA). Biro KSAP mengordinasikan tugas TA agar pekerjaan yang mereka lakukan dapat sesuai dengan kebutuhan anggota DPR dalam menjalankan tugas diplomasinya. Tugas TA sama seperti peneliti yaitu menyediakan data dan informasi bagi anggota Dewan.

Dalam mendukung setiap kunjungan kerja anggota Dewan ke luar negeri, para TA menyusun *talking point* sebagai pedoman setiap anggota dewan dalam memahami kondisi negara yang dikunjungi termasuk struktur organisasi parlemennya. Saya mengikuti beberapa rapat di Biro KSAP diantaranya tanggal 12 Mei 2019 dan 15 Juni 2019 dalam rangka membahas tentang rekomendasi Panja SDGs DPR RI kepada pemerintah dan alat kelengkapan Dewan tentang perkembangan implementasi *sustainable development goals*

Rapat tersebut dihadiri oleh peneliti HI dan tenaga ahli serta ASN di bagian organisasi kerjasama internasional. Didalam rapat itu, TA memaparkan hasil kunjungan kerja KSAP keluar negeri dan ke daerah. Sementara peneliti HI memaparkan hasil penelitian ke daerah terkait SDGs. Dalam pembuatan rekomendasi Panja tersebut, baik tenaga ahli KSAP maupun peneliti Puslit BK DPR saling berdiskusi tentang hasil yang didapat dari kegiatan yang telah dilakukan oleh masing-masing pihak.

Efektifitas rapat dalam konteks mendukung diplomasi parlemen masih kurang terlihat, mengingat SDGs tidak termasuk agenda utama kementerian luar negeri. Kedepan, TA KSAP dan Peneliti Hubungan Internasional Puslit BK DPRRI perlu meningkatkan kerjasama agar materi atau substansi yang diperlukan anggota Dewan bisa lebih lengkap. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat dimanfaatkan oleh anggota Dewan yang terlibat dalam diplomasi parlementer.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti HI lebih bersifat akademik karena didasarkan atas metodologi ilmiah sementara hasil yang didapat oleh TA merupakan hasil kunjungan kerja bersama anggota Dewan yang lebih banyak bersifat laporan. Memperhatikan kondisi semacam ini, saya berpendapat bahwa ke depan perlu kerja sama yang lebih intensif antara peneliti dengan TA KSAP agar materi atau substansi yang didapat oleh anggota Dewan menjadi lebih lengkap.

Demikian pula dengan rencana DPR RI meningkatkan jumlah grup kerja sama bilateral (GKSB) menjadi enam puluh, seharusnya terlebih dahulu dilakukan penelitian untuk mengetahui potensi dari negara yang hendak menjadi anggota GKSB.

Dalam rapat penyusunan rencana strategis Biro KSAP yang diadakan pada tanggal 22 April 2019, belum ada agenda pembahasan untuk penambahan jumlah GKSB menjadi 60 negara. Rapat lebih menganalisa perubahan lingkaran strategis dan isu- isu kontemporer sebagaimana diskusi kampus. Sekali lagi, peran tenaga ahli dalam menyusun paper atau laporan juga belum terlihat.

Pusat penelitian BK DPR RI setiap dua kali dalam satu bulan menyusun Infosingkat yang merupakan hasil analisis tentang perkembangan terkini Indonesia. Info singkat dicetak sebanyak lebih dari 560 eksemplar setiap penerbitan untuk memenuhi kebutuhan semua anggota dewan dan masyarakat umum. Namun analisis dalam info singkat belum menjadi bahan rujukan dalam buku talking point dan laporan kunjungan kerja BKSAP. Logikanya, perlu adanya ruang pembahasan ilmiah dalam mengkaji setiap agenda kunjungan kerja antara peneliti dengan tenaga ahli KSAP. Peneliti memiliki track record dalam publikasi baik buku maupun jurnal yang pemilihan topiknya memiliki korelasinya dengan kebutuhan alat kelengkapan dewan. Peneliti HI yang berjumlah

hanya delapan orang seringkali terlibat dalam pengerjaan pidato dan pointers kunjungan dari negara lain yang seringkali mendadak.

Ruang pembahasan tersebut bisa terlaksana bila terwujud kemitraan yang efektif antara peneliti dan tenaga ahli BKSAP. Selain bermanfaat bagi BKSAP dalam mewujudkan tujuan strategis jangka panjang, juga bermanfaat bagi peneliti untuk lebih kontekstual dengan karya ilmiah yang secara regular dikerjakan. Sehingga setiap rapat yang dihadiri oleh BKSAP dan Puslit benar benar berorientasi jangka Panjang, bukan taktis semata.

Contoh kongkrit kerja sama atau kemitraan dapat dilakukan dengan mekanisme pembuatan *talking point* dengan mengikuti standar penulisan paper. Kesempatan juga sangat terbuka bagi tenaga ahli BKSAP yang ingin melakukan publikasi ilmiah di jurnal yang dikelola oleh puslit. Sehingga *talking point* yang dibuat Biro KSAP tidak hanya bersifat generik dan pengetahuan umum, melainkan memiliki pengetahuan yang dapat diverifikasi secara *scientific*.

Jika Kemitraan tersebut terealisasi, maka akan sangat membantu efektivitas diplomasi parlemen. Arah diplomasi DPR RI semakin jelas karena memperbanyak GKSB akan semakin memperkuat mitra Indonesia dalam forum parlemen multilateral sekaligus. Selain itu, juga akan semakin meningkatkan sinergisitas dengan Kementrian luar Negeri sehingga konsep diplomasi total benar benar inheren dengan tujuan politik luar negeri Indonesia bebas aktif.

Diplomasi parlemen merupakan salah satu fungsi yang perlu dijalankan DPR RI dalam upaya mendukung politik luar negeri Indonesia. Namun dalam implementasinya, hasil diskusi diplomasi parlemen ditempatkan sebagai tambahan untuk bahan atau pembahasan Undang Undang di alat kelengkapan masing masing anggota. Sebagai

konsekuensinya, pembahasan yang bersifat sektoral menjadi penghambat untuk tujuan diplomasi parlemen secara komprehensif.

Problema tersebut berangkat dari belum tersedianya pedoman ilmiah berupa karya tulis yang menjadi bahan anggota dalam memperjuangkan diplomasi parlemen. Penggunaan bulletin info singkat yang tiap rilis tercetak lebih dari 560 eksemplar berbicara dalam kerangka multidisiplin keilmuan, Sedangkan *talking point* dikemas *country profile* sebagaimana pengetahuan yang bersifat umum. Secara umum keduanya membahas hal hal yang bersifat generik, sehingga belum secara spesifik menarget isu dan kepentingan strategis dalam menghadapi forum internasional.

Sedangkan jurnal ilmiah yang terbit sesuai jadwal dengan melibatkan mitra bestari secara format kurang bisa diterapkan dalam merespon dinamika internasional yang dapat berubah dengan cepat. Model working paper dirasa lebih presisi mengingat dalam kemitraan perlu adanya kesepakatan baik dari peneliti maupun BKSAP dengan waktu publikasi yang lebih fleksibel.

Penulisan working paper secara umum terdiri dari tiga, bagian, yakni pendahuluan, pembahasan dan kesimpulan. Working paper dapat ditulis oleh tim, ataupun masing masing individu membuat satu artikel yang digabung seperti jurnal. Terkait dengan banyaknya halaman, working paper ditulis antara lima sampai dua puluh halaman pada tiap tiap artikel.

Diskusi sebagai implementasi kemitraan working paper dikemas dengan mengikuti waktu rapat antara BKSAP dan Peneliti HI. Semisal beberapa minggu menjelang agenda forum multilateral dan kunjungan kerja. Atau pun, pada saat kunjungan parlemen internasional ke Indonesia. Bisa juga digunakan waktu senggang yang tetap didasarkan atas kesepakatan dan kesukarelaan peneliti dan BKSAP.

B. PEMILIHAN ISU PRIORITAS

Isu yang telah dipilih merupakan isu yang mendapat pertimbangan berdasarkan analisis APKL (Aktual, Problematik, Kekelayakan, Layak). Setelah melalui analisis tersebut, untuk menentukan prioritas dari ke tiga isu tersebut maka dilakukan analisis menggunakan teknik USG (Urgent, Seriousness, Growth). Berikut tabel hasil analisis USG:

Tabel. A Matrik Isu Prioritas Teknik USG

Isu	Kriteria			Jumlah Nilai
	U	S	G	
1. Belum tersedianya Karya Tulis Ilmiah yang sesuai dengan kebutuhan Diplomasi Parlemen	4	5	4	13
2. Belum optimalnya kemitraan tenaga ahli BKSAP dengan Peneliti HI	4	2	3	9
3. Belum adanya Penggunaan Working Paper Dalam Mendukung Target GKSB	4	3	4	11

Ket. Nilai 1= sangat rendah; 5= sangat tinggi

Berdasarkan analisis USG tersebut maka isu yang dipilih adalah isu ke-3 yaitu belum dimanfaatkannya informasi artikel ilmiah GS secara online pada website puslit.dpr.go.id. Aspek **U (Urgency)** dilihat dari seberapa mendesaknya isu yang harus diselesaikan. Isu pertama sangat mungkin diselesaikan dalam kurun waktu 30 hari saat habituasi. Selanjutnya, isu tersebut memuat kompetensi utama dari peneliti terkait output kinerja

sehingga motivasi dari peneliti diharapkan meningkat untuk lebih koordinatif dan berorientasi pada hasil. Selanjutnya aspek **S (Seriousness)** dilihat dari seberapa serius dampak yang ditimbulkan jika isu tidak segera ditindak lanjuti. Mengingat isu ini merupakan kompetensi utama peneliti dan tenaga ahli maka dampak yang ditimbulkan berupa rendahnya produktifitas dan kualitas DPR baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Sementara itu, aspek **G (Growth)** merupakan potensi membesarnya masalah jika isu tidak segera ditindak lanjuti. Adapun dampak yang ditimbulkan yaitu kurang baiknya citra institusi pusat penelitian dan BKSAP menurunnya kepercayaan para anggota dewan dan masyarakat, bahkan di mata Internasional.

C. GAGASAN PEMECAHAN ISU

Terkait dengan belum tersedianya karya tulis ilmiah yang sesuai dengan kebutuhan diplomasi parlemen, maka penyediaan karya tulis perlu mempertimbangkan ritme pekerjaan Biro KSAP yang memiliki fungsi administrasi dalam mendukung misi Diplomasi DPR RI. Untuk itu di pilihlah format working paper yang dapat dipublikasi secara fleksibel tanpa mengurangi konten yang hendak dipublikasikan.

D. GAGASAN PEMECAHAN ISU

Terkait dengan belum tersedianya karya tulis ilmiah yang sesuai dengan kebutuhan diplomasi parlemen, maka penyediaan karya tulis perlu mempertimbangkan ritme pekerjaan Biro KSAP yang memiliki fungsi administrasi dalam mendukung misi Diplomasi DPR RI. Untuk itu diplihlah format working paper yang dapat dipublikasi secara fleksibel tanpa mengurangi konten yang hendak dipublikasikan.

E. MATRIKS RANCANGAN AKTUALISASI

UNIT KERJA : Pusat Penelitian

IDENTIFIKASI ISU : Belum tersedianya karya tulis ilmiah yang sesuai dengan kebutuhan diplomasi parlemen, belum optimalnya kemitraan Tenaga Ahli BKSAP dan Peneliti, dan Belum adanya Penggunaan working paper dalam upaya memenuhi target GKSB.

ISU YANG DIANGKAT : Belum tersedianya karya tulis ilmiah yang sesuai dengan kebutuhan diplomasi parlemen.

GAGASAN PEMECAHAN ISU : Penyediaan karya tulis perlu mempertimbangkan ritme pekerjaan Biro KSAP dalam upaya efektivitas diplomasi parlemen.

Tabel B. Kegiatan	Tahapan kegiatan	Output	Keterkaitan dengan substansi materi pelatihan	Kontribusi terhadap visi misi organisasi	Penguatan nilai organisasi
1. Konsultasi dengan pimpinan	1.1. Melaporkan kepada Koordinator Bidang, kepala pusat penelitian dan Biro KSAP; 1.2. memberi pengumuman awal kepada Tenaga Ahli BKSAP untuk mempersiapk an bahan tambahan atau masukan	Lembar persetujuan dan Draft tema awal yang akan dibahas untuk diperdalam	<i>Accountability is a relationship</i> (Akuntabilitas) Setia pada Pancasila dan UUD 45 (nasionalisme) Mengutamakan komunikasi yang ramah dan santun (etika public) memikirkan inovasi demi kepuasan anggota dewan & masyarakat (Komitmen Mutu) kolaborasi antar Lembaga (whole of government)	Visi→ Menjadi Pusat Penelitian yang profesional, netral, andal dan akuntabel dalam mendukung terwujudnya parlemen modern. Misi→ Mengoptimalkan dukungan keahlian melalui kegiatan penelitian yang profesional, netral dan akuntabel. Memberikan dukungan keahlian melalui kegiatan pengkajian yang profesional, netral dan akuntabel. Melakukan pengembangan kepakaran dan kompetensi SDM yang andal.	Bekerja dengan niat ibadah (religius) Konsultasi merupakan wujud mekanisme pelaporan (akuntabilitas) Bekerja diluar SKP (professional) Pemanfaatan waktu secara jujur (integritas)

2. Mengumpulkan bahan topik penulisan	2.1. Berkonsultasi dengan mentor; 2.2. Mencari informasi artikel ilmiah dan media sebagai bahan	Tersedianya daftar identifikasi isu strategis yang telah dan yang belum memiliki publikasi ilmiah	Disiplin dalam pelaporan (akuntabilitas) Mewujudkan kebaikan bagi negeri (nasionalisme) mencari informasi yang tidak menyinggung (sensitive) (etika public) metode pengumpulan informasi melalui dan prosedur yang kredibel (Komitmen mutu)	Visi→ Menjadi Pusat Penelitian yang profesional, netral, andal dan akuntabel dalam mendukung terwujudnya parlemen modern. Misi→ Mengoptimalkan dukungan keahlian melalui kegiatan penelitian yang profesional, netral dan akuntabel. Memberikan dukungan keahlian melalui kegiatan pengkajian yang profesional, netral dan akuntabel. Melakukan pengembangan kepakaran dan kompetensi SDM yang andal.	Bekerja adalah ibadah (religius) Konsistensi dalam transparansi (akuntabilitas) Bekerja diluar SKP (professional) Pemanfaatan waktu secara jujur (integritas)
3. Diskusi dengan peneliti yang pakar di bidang isu tersebut	3.1. Berkonsultasi dengan mentor; 3.2. Melakukan wawancara	Tersedianya draft paper yang akan dipresentasikan	Tanggung jawab menerima masukan dan kritik (akuntabilitas) berperan mencerdaskan masyarakat secara umum	Visi→ Menjadi Pusat Penelitian yang profesional, netral, andal dan akuntabel dalam mendukung terwujudnya parlemen modern.	Bekerja adalah ibadah (religius) Konsultasi merupakan

	dengan peneliti	bersama BKSAP	(nasionalisme) seleksi informasi (komitmen mutu) dorongan untuk mempublikasikan setiap anggota dewan dan masyarakat (Etika publik)	Misi→ Mengoptimalkan dukungan keahlian melalui kegiatan penelitian yang profesional, netral dan akuntabel. Memberikan dukungan keahlian melalui kegiatan pengkajian yang profesional, netral dan akuntabel. Melakukan pengembangan kepakaran dan kompetensi SDM yang andal.	wujud mekanisme pelaporan (akuntabilitas) Bekerja diluar SKP (professional) Pemanfaatan waktu secara jujur (integritas)
4. Berkoordinasi dengan tenaga ahli BKSAP untuk menentukan jadwal	4.1. Melakukan koordinasi dengan mentor dan Tenaga ahli 4.2. Mempresentasikan bahan awal untuk ditambahkan	Tersedianya draft akhir yang akan dicetak dalam format <i>working paper</i> sebagai bahan anggota dewan.	Tanggung jawab untuk menerima masukan dari Lembaga terkait (akuntabilitas) Merupakan wujud bela negara (nasionalisme) membangun dialog dengan publik secara ilmiah, dan ramah (etika publik)	Visi→ Menjadi Pusat Penelitian yang profesional, netral, andal dan akuntabel dalam mendukung terwujudnya parlemen modern. Misi→ Mengoptimalkan dukungan keahlian melalui kegiatan penelitian yang profesional, netral dan akuntabel.	Bekerja adalah ibadah (religius) Konsistensi dan keterbukaan dalam mekanisme pelaporan (akuntabilitas)

	4.3. direvisi secara Bersama sama		novelty dari biro KSAP serta peneliti HI (komitmen mutu). kolaborasi dan kerja sama antar unit. (Whole of Government)	Memberikan dukungan keahlian melalui kegiatan pengkajian yang profesional, netral dan akuntabel. Melakukan pengembangan kepakaran dan kompetensi SDM yang andal.	Bekerja diluar SKP (professional) Pemanfaatan waktu secara jujur (integritas)
5. Konsultasi dengan pembimbing terhadap hasil akhir	5.1. Konsultasi dengan mentor untuk mengajukan Pembimbingan presentasi untuk calon peneliti. 5.2. Mengontak Narasumber/ Pemateri ahli presentasi Mengadakan forum	File Presentasi draft laporan aktualisasi	Pertanggungjawaban konsultasi dengan Koordinator (Akuntabilitas) Siap sedia rela berkorban membela bangsa dan negara (nasionalisme) meminta izin untuk mengajukan kegiatan pembimbingan (etika publik). Memperbaiki kekurangan (Komitmen mutu) Kolaborasi antar Lembaga (Whole of government)	salah satu fungsi Pusat Penelitian yaitu koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pusat Penelitian. Kegiatan tersebut juga sejalan dengan Visi yaitu menjadi Pusat Penelitian yang profesional, netral, andal, dan akuntabel dalam mendukung terwujudnya parlemen modern.	Pelaksanaan pembimbingan presentasi sesuai dengan organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yaitu Profesional, Integritas dan Akuntabel

	5.3. Melaporkan hasil kegiatan pada Kepala Pusat Penelitian		pembimbingan dituangkan penyusunan presentasi dilaporkan pada koordinator bidang (manajemen ASN)		
--	---	--	---	--	--

BAB IV
PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. PENJELASAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

Pelaksanaan aktualisasi yang dilaksanakan mulai Minggu ke-4 Agustus sampai dengan Minggu pertama Oktober 2019 melalui kegiatan-kegiatan yang telah disusun dalam rancangan aktualisasi sebelumnya yang telah dipaparkan pada saat Latihan Dasar (Latsar) CPNS Angkatan III Setjen dan BK DPR RI di Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI Wisma Griya Sabha Kopo. Secara keseluruhan, lima kegiatan tersebut telah dijabarkan melalui tahapan-tahapan kegiatan yang relevan sehingga menghasilkan output dari setiap tahapannya. Berikut penjelasan pelaksanaan aktualisasi yang saya lakukan :

Tabel D. Kegiatan Pertama

Kegiatan	Tahapan kegiatan	Output
1. Konsultasi dengan pimpinan	1.1. Melaporkan kepada Koordinator Bidang, kepala pusat penelitian dan Biro KSAP 1.2. memberi pengumuman awal kepada Tenaga Ahli BKSAP untuk mempersiapkan bahan tambahan atau masukan	Lembar persetujuan dan Draft tema awal yang akan dibahas untuk diperdalam

Konsultasi dengan Mentor dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2019. Saya membawa draft persetujuan untuk ditandatangani termasuk didalamnya lembar pengesahan. Saya berdiskusi dengan mentor terkait dengan draft awal yang akan didiskusikan. Hal tersebut sedikit berbeda dengan jadwal yang dipresentasikan pada proposal dimana hal tersebut baru akan dibahas pada agenda kegiatan keempat. Namun hal tersebut lebih baik mengingat pada tanggal 3-5 september 2019 Mentor beserta Tim BKSAP sedang mengikuti acara Sustainable Development Goals Forum di Bali. Berikut merupakan kutipanscreenshot antara saya dengan mentor.



Gambar. 4.1 Diskusi dengan Mentor

Saya dan Mentor menyepakati sebuah topik pembahasan working paper yang mencoba mencari korelasi antara Sustainable Development Goals dan Financial Inclusion. Yang mana dalam rangka pengentasan kemiskinan, akses finansial kepada masyarakat, khususnya yang belum terbiasa dengan akses keuangan untuk lebih ditingkatkan mengingat realisasi program finansial inclusion baru pada tahap lima puluh persen. Mentor juga mengingatkan tentang jadwal rapat dengan tenaga ahli pada hari senin. Berikut ini foto kegiatan hasil diskusi dengan mentor.



Gambar 4.2. Konsultasi dengan mentor

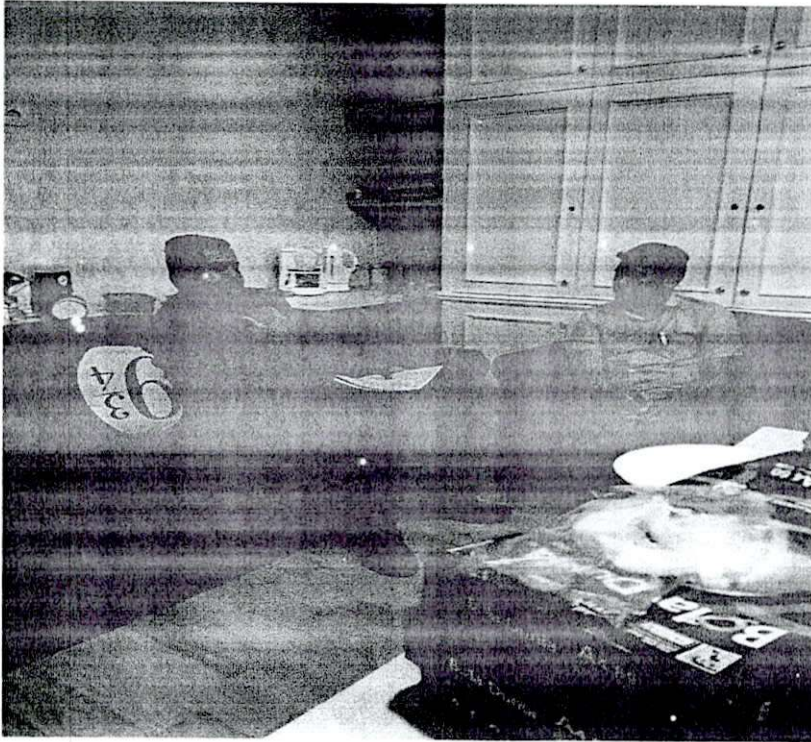
Agenda pertama tersebut memiliki Kaitan dengan Nilai-nilai Dasar ANEKA, Peran dan Kedudukan, serta Nilai Organisasi diantaranya.

Etika Publik	Kegiatan berkonsultasi dan berdiskusi dengan Koordinator Bidang sebagai Mentor dalam kegiatan ini serta dengan di Biro kerjasama antar parlemen DPR RI dilakukan dalam semangat <i>open parliament</i> dan asaz keterbukaan
Komitmen Mutu	Pembuatan <i>working paper</i> yang digunakan dan kegiatan diskusi dilakukan secara inovatif mengikuti irama pekerjaan yang ada dan mengandung unsur kebaruan (<i>novelty</i>)
Nasionalisme	Setiap informasi yang didapatkan harus berdasarkan kebutuhan kegiatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan upaya untuk memperkuat posisi DPR dalam meraih kepentingan nasional
Akuntabilitas	Isu dalam <i>working paper</i> yang sudah dipilih kemudian dituangkan dalam dikomunikasikan lintas bidang sejak awal dan hasil aktualisasi yang dilaporkan kepada Koordinator Bidang sebagai bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan penulis untuk menjaga mekanisme pelaporan
WoG	Dalam hal berkonsultasi dan berdiskusi dengan tenaga ahli mengutamakan prinsip dengan pendekatan menghilangkan mental silo, dan bersifat kolaboratif agar tercipta suatu keselarasan untuk mencapai <i>output</i> yang diinginkan.

Profesional	Dalam hal menentukan isu kegiatan mengandalkan keahlian sesuai profesi sebagai seorang peneliti dengan terlebih dahulu merencanakan siap melakukan apapun kegiatan yang dilakukan sehingga dapat nantinya dapat sesuai dengan output walau bekerja diluar SKP
Integritas	Memberi keterangan yang konsisten dan akurat kepada mitra kerja

Tabel D. Nilai Nilai kegiatan pertama

Pada tanggal 2 September 2019, saya diajak oleh mentor bertemu dengan para Tenaga Ahli BKSAP. Kami mendiskusikan tentang format working paper yang merupakan temuan terbaru untuk bentuk kemitraan antara BKSAP dengan Peneliti. Dalam diskusi tersebut pihak BKSAP menyetujui format working paper yang dirasa presisi, terlebih dengan tema Sustainable development Goals. Namun dengan catatan tidak terlalu banyak hal hal yang ditulis didalam pembahasan karena anggota sibuk. Sehingga idealnya maksimum sepuluh halaman. Namun terdapat kesalahan teknis pada pemotretan yang terhapus seminggu setelahnya karena faktor HP saya sendiri. Berikut adalah foto foto dimana merepresentasikan waktu diskusi.



Gambar. 4.3. Diskusi dengan Tenaga Ahli

Dalam diskusi yang dilakukan, pihak BKSAP tidak berkeberatan dalam menyusun working paper. Teman teman tenaga ahli mengapresiasi jika dilibatkan. Di sisi lain, saya juga menyatakan sangat terbantu jika ada data atau masukan tambahan terkait atau bahkan tulisan yang siap untuk ditampilkan. Kami juga mencoba membaca beberapa tulisan untuk referensi yang tersedia di meja Tenaga Ahli.



Gambar 4.4 . Mencari bahan di Ruang BKSAP

Total tenaga ahli yang hadir mencapai lima orang. Namun kehadiran tersebut pada saat awal saya beserta mentor datang ke ruangan hanya ada dua tenaga ahli. Dengan kata lain, yang mendengarkan penjelasan kami tentang working paper hanya dua, yakni Ibu Lia dan Pak Aang. Saya juga belum sempat mendiskusikan draft topik kepada tenaga ahli.

Kebetulan saja beberapa hari setelah pertemuan ini, pihak tenaga ahli BKSAP sedang mengikuti world parliamentary forum di Bali. Sebagian dari tenaga ahli mengakui bahwa untuk lebih detail dan substantive akan sangat terbagi waktu dengan agenda yang dimiliki. Faktor lain adalah masa

berakhirnya masa kerja yang berakhir bulan oktober. Saya pun menunggu barangkali ada data data tambahan dari pertemuan Bali.

2. Pengumpulan Bahan

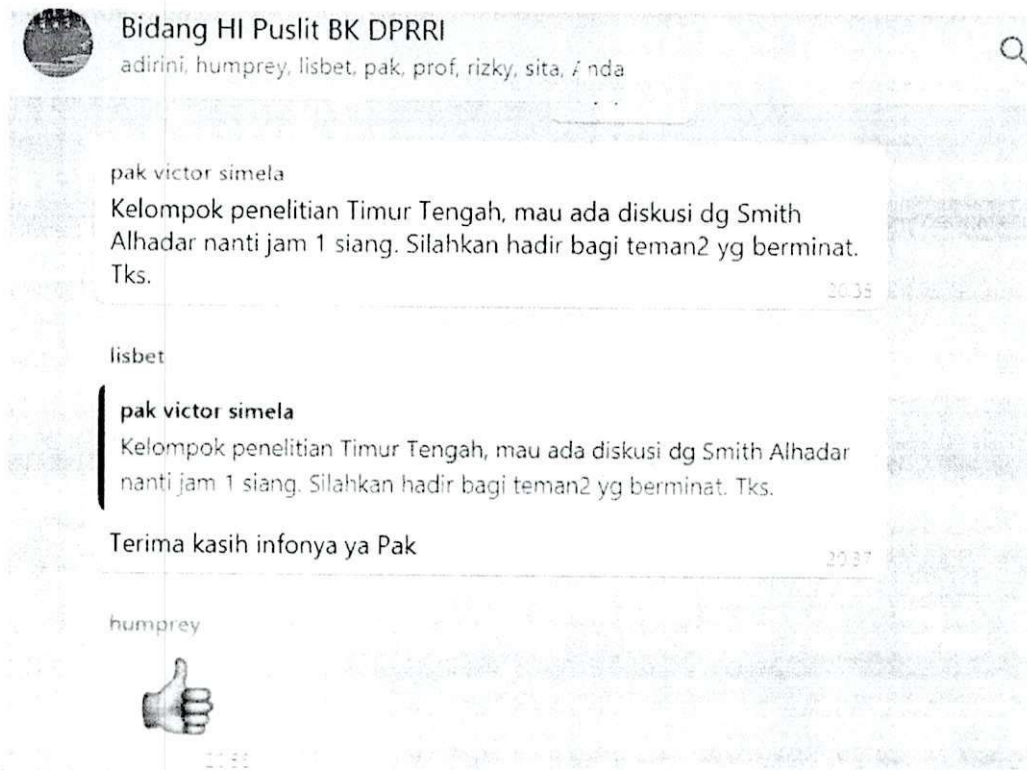
Pada agenda kedua ini, bukan merupakan tugas kelompok dan dapat dilakukan tanpa persetujuan mentor. Saya melakukan secara mandiri di beberapa tempat, baik secara online maupun perpustakaan di lantai tiga. Di perpustakaan lantai satu dan dua yang kebetulan masih pada tahap renovasi. Data data yang saya dapatkan di bulan bulan sebelumnya juga saya baca ulang untuk menambah referensi. Berikut adalah secuplik kegiatan kedua.

Kegiatan	Tahapan	Output
Mengumpulkan bahan topik penulisan	2.1. Berkonsultasi dengan mentor 2.2. Mencari informasi artikel ilmiah dan media sebagai bahan	Tersedianya daftar identifikasi isu isu strategis yang telah dan yang belum memiliki publikasi ilmiah

Tabel E. Tabel Kegiatan Kedua

Terdapat pengumuman diskusi tentang dinamika timur tengah yang diadakan oleh bidang HI mengundang Prof Smith Alhadar pada tanggal 10 September 2019 pada pukul 13.00. Saya tidak menyanyiakan kesempatan tersebut karena banyak sekali senior berpengalaman yang hadir. Tanpa diduga, acara diskusi tersebut yang juga dihadiri beberapa teman dari perwakilan Tenaga Ahli BKSAP. Dalam diskusi tersebut, terdapat beberapa kasus kasus kontemporer yang mengindikasikan peran negara negara besar

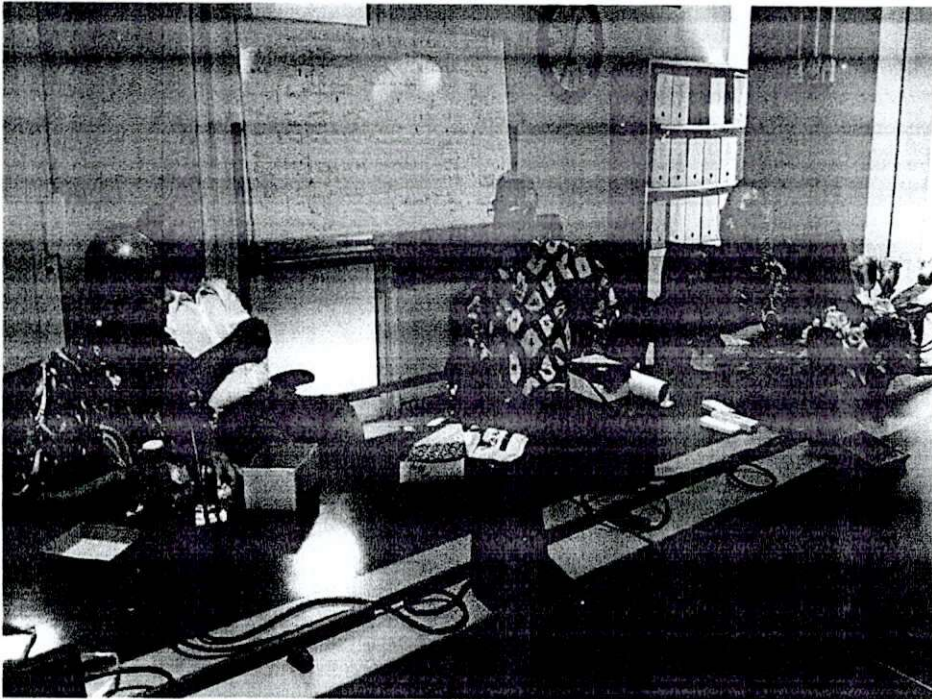
di timur tengah. Diskusi tersebut dapat mempertajam peneliti untuk menghasilkan draft isu-isu strategis. Banyak masukan kepada saya untuk lebih sesuai dengan kebutuhan parlemen. Berikut merupakan pengumuman yang saya dapatkan dari grup peneliti HI.



Gambar 4.5. Gambar pengumuman diskusi

Potongan Screenshot tersebut akhirnya membuat saya teringat bahan-bahan yang pernah saya cari di bulan Juli. Saya bergegas untuk mengikuti diskusi walaupun sejatinya antara bahan saya dengan yang dipresentasikan dengan Prof. Smith Alhadar jelas memiliki korelasi yang jauh. Namun saya bersikeras setelah mendapat persetujuan dengan mentor. Berikut merupakan foto sesi tanya jawab dalam diskusi tersebut yang dihadiri oleh Prof. Partogi

Nainggolan, Drs Viktor Simela, Dr Hariyadi, Lisbet M Si, Ilyas MA dan Aang MSc.



Gambar.4.6 Diskusi dengan Peneliti HI.

Agenda pencarian data tersebut memiliki Kaitan program dengan Nilai-nilai Dasar ANEKA, Peran dan Kedudukan, serta Nilai Organisasi:

akuntabilitas	Kegiatan pada tahap ini walaupun dilakukan secara mandiri tetap memegang teguh mekanisme pelaporan yang akan dikoordinasikan dengan Biro KSAP
Komitmen Mutu	Dari hasil pencarian data yang telah dilakukan diharapkan memiliki novelty yang baik untuk memenuhi mutu dalam kegiatan sehingga dapat memberi temuan baru
Nasionalisme	Dalam pencarian referensi untuk menunjang buku pedoman, dilakukan dengan cara mencari referensi-referensi yang berasal dari penerbit dalam negeri, serta menempatkan kepentingan nasional diatas yang lain.
etika publik	Setelah referensi ditemukan dan telah dilakukan review terhadap referensi maka akan dibuatkan sebuah laporan dan temuan dari hasil review kepada Koordinator Bidang dan Mendiskusikannya dalam sebuah forum informal sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan penulis yang nantinya akan melakukan diseminasi pada publik

WoG	Pencarian referensi dilakukan pada bagian perpustakaan, maupun pada bidang lainnya menggunakan prinsip dengan pendekatan yang bersifat kolaboratif dengan bidang lain agar tercipta suatu keselarasan untuk mencapai output yang diinginkan.
Profesional	Melakukan kegiatan yang tidak dapat menjadi cum merupakan bentuk profesional karena memegang teguh kepentingan publik yang utama dan siap bekerja di luar jam kantor
Integritas	Berprilaku jujur, memegang teguh prinsip-prinsip kebenaran, etika dan moral dalam mencari data dan sumber referensi tanpa mengharapkan penghasilan tambahan

Tabel F. Nilai Nilai Kegiatan Kedua

3. Diskusi dengan peneliti yang pakar di Isu tersebut.

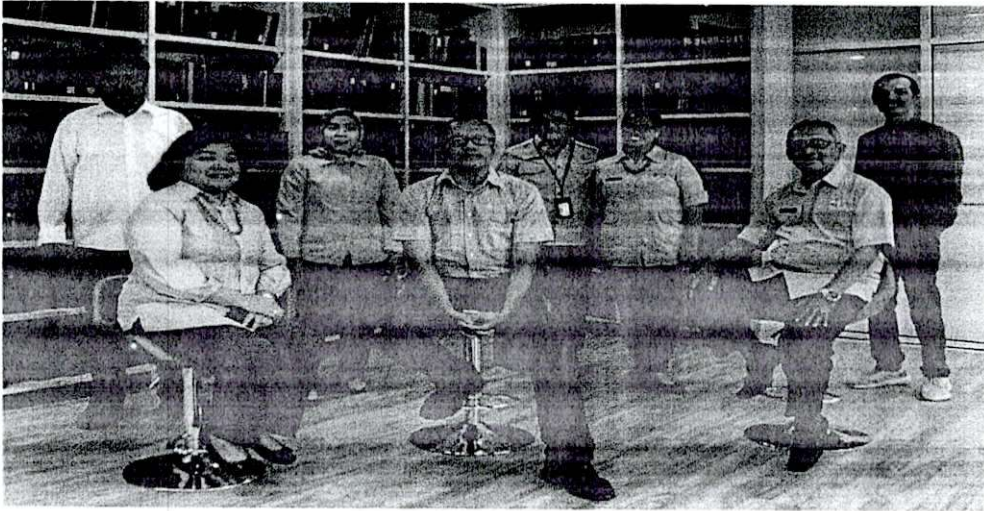
Dalam agenda ketiga ini, saya mengalami kebingungan karena Hubungan Internasional memiliki beberapa peneliti yang pakar. Di sisi lain, agenda ini masih intersep dengan agenda penulisan buku Bunga Rampai. Untuk itu, perlu mencari waktu yang pas karena di minggu kedua dan ketiga September agenda diskusi dengan coaching juga banyak. Namun terdapat agenda pertemuan bersama yang akhirnya saya manfaatkan.

Kegiatan	Tahapan	Output
Diskusi dengan peneliti yang pakar di bidang isu tersebut	A. Berkonsultasi dengan mentor B. Melakukan diskusi dengan peneliti	Tersedianya draft paper yang akan dipresentasikan bersama BKSAP

Tabel G. Tabel Kegiatan Kedua

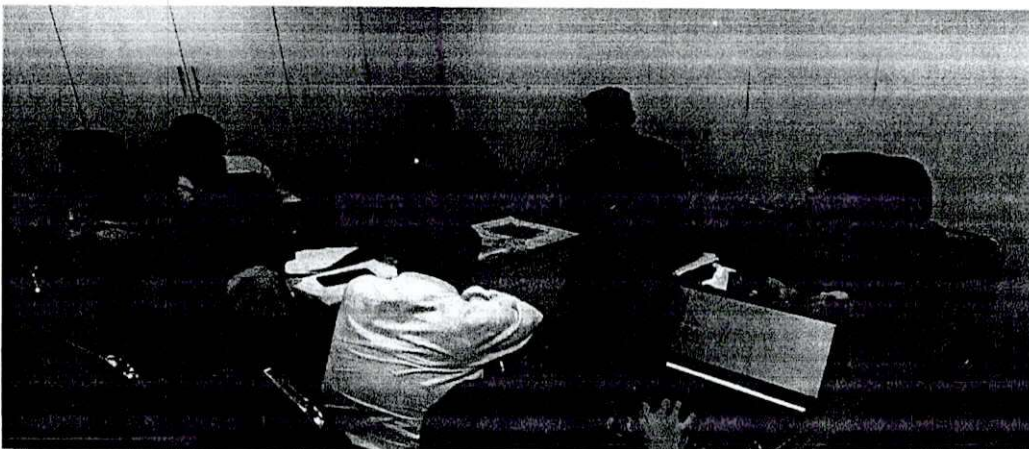
Pada kegiatan ketiga ini diskusi dengan peneliti. Penulis juga telah melakukan diskusi dengan senior-senior peneliti yang ada di Pusat Penelitian Setjen dan BK DPR RI untuk meminta masukan dan tanggapan mengenai isu-isu kegiatan yang telah disiapkan penulis. Ada beberapa masukan pula yang mereka sampaikan. Masukan tersebut tidak jauh berbeda seperti masukan yang diberikan oleh Mentor yaitu untuk dapat lebih menyesuaikan kegiatan kegiatan yang akan dilakukan dan memperhatikan jadwal dari peneliti.

Selain itu, banyak yang berpandangan mengatur jadwal dengan BKSAP di bulan bulan September ini memang sangat susah seiring banyaknya tugas tugas perundang undangan. Dan terdapat juga masukan seperti lebih menekankan pada keikutsertaan dari CPNS dalam diklat-diklat yang diadakan oleh pihak eksternal guna menunjang tugas dan profesi sebagai peneliti nantinya. Pada Intinya, para peneltii mengatakan selamat mencoba untuk bekerjasama dengan BKSAP yang tentu tidak mudah. Berikut ini, merupakan hasil photo Bersama dengan semua peneliti di perpustakaan.



Gambar 4.7. Kumpul Dengan Semua Peneliti HI

Sehubungan dengan agenda ketiga yang tidak terlalu padat, maka agenda tentang coaching juga dilakukan pada pertengahan bulan mengingat waktu yang masih longgar. Berikut ini merupakan hasil diskusi dengan coach tentang perlunya saya mengutamakan sistematika dalam penulisan yang masih kurang.



Gambar 4.8. Coaching

Etika Publik	Kegiatan berkonsultasi dan berdiskusi dengan Koordinator Bidang sebagai Mentor dalam kegiatan ini serta dengan Para Peneliti Senior di Pusat Penelitian Setjen dan BK DPR RI dilakukan dengan sopan santun dan etika yang baik
Komitmen Mutu	Pembuatan isu kegiatan yang digunakan dan kegiatan diskusi yang dilakukan selain dengan mementingkan unsur kebaruan (novelty) dari setiap bahasan kegiatan dengan ketelitian dan sistematika dalam mengumpulkan informasi dari narasumber
Nasionalisme	Menempatkan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan hal hal taktis semata
Akuntabilitas	Isu kegiatan yang sudah dipilih kemudian dituangkan dalam konsep rancangan penulisan sebagai gambaran besar dalam tahap awal kegiatan penulisan aktualisasi yang dilaporkan kepada Koordinator Bidang sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan penulis
(WoG)	Dalam hal berkonsultasi dan berdiskusi dengan mentor dan senior serta lintas bidang mengutamakan prinsip dengan pendekatan yang bersifat kolaboratif agar tercipta suatu keselarasan untuk mencapai output yang diinginkan.

Profesional	Melakukan kegiatan yang tidak dapat menjadi cum merupakan bentuk professional karena memegang teguh kepentingan publik yang utama
Integritas	Secara konsisten memegang teguh prinsip-prinsip kebenaran, komunikasi dalam membuat laporan tanpa mengubah atas dasar maksud keuntungan pribadi

Tabel H. Nilai Nilai Kegiatan Ketiga

4. Berkoordinasi Dengan Tenaga Ahli

Pada kegiatan keempat ini yang saya kembali berdiskusi dengan mentor secara informal, Di sisi lain, saya juga mencoba mengontak tenaga ahli BKSAP. Mentor melihat bahwa topik yang saya buat tidak sinkron antara judul dan pembahasan. Berikut sejatinya draft kegiatan saya dengan Tenaga ahli BKSAP.

Tabel.I kegiatan keempat

Agenda	Tahapan	Output
Berkoordinasi dengan tenaga ahli BKSAP untuk menentukan jadwal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan mentor dan Tenaga ahli 2. Mempresentasikan bahan awal untuk ditambahkan direvisi secara Bersama sama 	Tersedianya draft akhir yang akan dicetak dalam format <i>working paper</i> sebagai bahan anggota dewan.

Merespon penilaian dari mentor, Saya juga menyempatkan mengirim email kepada tenaga ahli BKSAP untuk memberikan komentar saya memberi beberapa pertanyaan kuesioner agar mempermudah para tenaga ahli BKSAP. Berikut merupakan draft pertanyaan kuesioner yang saya buat;

1. Menurut bapak dan ibu, berapa idealnya halaman dari sebuah working paper?
2. Menurut bapak dan ibu, bagian mana yang perlu ditambahkan? pendahuluan, pembahasan atau penutup?
3. Menurut bapak dan ibu, bagian mana yang perlu dikurangi? Pendahuluan, pembahasan atau penutup?
4. Menurut bapak dan ibu, apakah ada alternatif pembabakan? misal penutup diganti kesimpulan dll
5. Menurut bapak dan ibu, apakah referensi dengan footnote sudah tepat atau perlu diganti running note atau endnote?

terima kasih atas kerjasamanya

Setelah membaca balasan dalam email tersebut, saya berkonsultasi kembali dengan mentor. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 7 oktober 2019. Saya juga mendapat balasan email dari teman teman BKSAP. Secara lebih spesifik pak Aang yang juga mewakili teman teman BKSAP memberikan banyak masukan dan kritik yang sangat membantu melalui email. Berikut merupakan balasan dari teman teman BKSAP.

Sebelum menjawab beberapa pertanyaan tersebut, sejumlah masukan sekiranya berkenan kami sampaikan utk konten working paper:

1. Pembahasan lompat2 dalam konteks inklusi keuangan. Pada paragraf kedua (bab latar belakang) misalnya, dari bicara capaian inklusi keuangan,

tiba2 ada tulisan terkait UU Perlindungan data pribadi, tanpa korelasi jelas antarkalimat.

2. Data-data dalam awal latar belakang tanpa disebut sumber sehingga akurasi data dipertanyakan. Bagi anggota DPR, data dan keakuratannya menjadi dasar argumen berdebat dengan eksekutif mas. Sementara berdasarkan data Bappenas, yang disampaikan pada Fintech Summit 2019, mengungkap inklusi keuangan mencapai 48,86% (bukan 50% sebagaimana dalam naskah) dengan literasi keuangan mencapai 21%.
3. Pembahasan juga kemudian berpindah ke infrastruktur, tanpa keterkaitan erat dengan konteks inklusi keuangan. Plus, termasuk pula dalam konteks hegemoni keuangan AS tanpa singgungan inklusi keuangan.
4. Dalam naskah, belum dilihat misalnya, best practices yang dimiliki oleh negara lain khususnya dalam policy/UU terkait inklusi keuangan. Sekaligus, belum terlihat uraian lebih lanjut bagaimana SDGs dapat support inklusi keuangan.

Terkait pertanyaan yang disampaikan Mas Ziyad, masukan saya sebagai berikut:

1. Idealnya halaman working paper: menurut saya tidak ada gambaran jumlah halaman ideal. Titik berat adl pada konten dan seberapa komprehensif informasi/hasil penelusuran/hasil riset yang dapat disajikan oleh Working Paper untuk memberikan gambaran kebijakan yang dpt diambil oleh anggota DPR dalam isu tertentu.
2. bagian yg perlu ditambahkan dalam working paper ini adalah terkait Pendahuluan (dalam hal mengantarkan hubungan SDGs dan inklusi keuangan), pembahasan (dalam hal mengurai lebih jauh keterkaitan erat antara SDGs dan inklusi keuangan hingga bagaimana sejarah SDGs dapat mencakup inklusi keuangan), penutup (dapat lebih tepat diambil konteks kesimpulan saja dengan memberikan gambaran ruang kebijakan

yang perlu ditindaklanjuti/ditangani oleh DPR untuk mendorong pencapaian SDGs menuju inklusi keuangan).

3. bagian yang perlu dikurangi adalah pembahasan terlalu jauh dalam isu-isu hegemoni keuangan AS hingga infrastruktur (kecuali dapat menggambarkan hubungan lebih jauh antara isu tersebut dengan SDGs dan inklusi keuangan).
4. alternatif pembabakan dapat menyesuaikan konten yang ingin dibangun. pembahasan dapat lebih dieksplorasi. Sementara Pendahuluan dapat pula menjadi pengantar (untuk masuk ke dalam bab lebih lanjut), sementara penutup dapat lebih mengarah kepada kesimpulan.
5. referensi footnote dapat memadai. Namun demikian dalam hal yang terkait data dan angka apabila tanpa footnote (sumber referensi lebih lanjut) akan berbahaya, krn dapat mengacaukan asumsi pendapat DPR.

Sekiranya demikian mas Ziyad masukan2 terkait. mohon maaf bila kurang memadai. Terlampir juga saya sertakan contoh2 Working Paper baik dalam wujud Working Paper UN, maupun NGO hingga Discussion Paper di Parlemen.

Working Paper UN:

https://www.un.org/esa/desa/papers/2019/wp160_2019.pdf

https://www.un.org/esa/desa/papers/2018/wp156_2018.pdf

NGO:

<https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/2989.pdf>

Discussion Paper:

[Discussion paper – Parliament of Australia](#)

Masukan masukan tersebut saya anggap sangat membantu penulisan saya. Masukan tersebut saya fungsikan untuk penulisan output kedua saya. Mengingat pada output pertama saya terdapat banyak kesalahan yang perlu diperbaiki. Bagi saya, Tenaga ahli dapat membantu untuk menentukan format working paper. Namun ternyata karena format tersebut belum familiar, para Tenaga Ahli BKSAP lebih fokus pada apa dan bagaimana Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di DPR.

5. Konsultasi dengan Pimpinan

Pada agenda kelima ini dimulai 8 oktober 2019 terfokus pada penyajian untuk laporan aktualisasi dan penyelesaian working paper. Di sisi lain, kesibukan dari teman teman BKSAP membuat ada jadwal agenda keempat yang harus diulang di bab kelima. Sehingga yang tertunda tersebut perlu saya percepat karena working paper adalah sesuatu yang baru di pusat penelitian dan harus saya segera selesaikan agar diketahui oleh kepala pusat penelitian. Berikut adalah agenda minggu kelima.

Kegiatan	Tahapan	output
Konsultasi dengan pembimbing terhadap hasil akhir	A. Konsultasi dengan mentor untuk mengajukan Pembimbingan presentasi B. Melaporkan hasil kegiatan pada Kepala Pusat Penelitian	File Presentasi draft laporan aktualisasi

Tabel K

Berdasarkan hasil analisa mentor ditemukan kesalahan yang sangat mendasar dari tulisan saya. Bahwa finansial inklusif adalah sebagaimana yang ada dalam program PBB tentang sustainable development goals berbeda jauh dengan program bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan. Sedangkan yang

saya pahami bahwa hal tersebut merupakan program yang sama. Akhirnya mentor pun memberikan pilihan kepada saya untuk mengganti judul atau mengganti bagian pembahasan secara signifikan. Untuk detail working paper ada di lampiran.

Saya memilih untuk mengganti judul, termasuk merevisi beberapa hal di kesimpulan yang menurut mentor terlalu bertele tele. Selain itu, juga penilaian teman teman tenaga ahli BSAP bahwa pembahasan (dalam hal mengurai lebih jauh keterkaitan erat antara SDGs dan inklusi keuangan hingga bagaimana sejarah SDGs dapat mencakup inklusi keuangan), penutup (dapat lebih tepat diambil konteks kesimpulan saja dengan memberikan gambaran ruang kebijakan yang perlu ditindaklanjuti/ditangani oleh DPR dan menghasilkan gambaran seperti ini;



Gambar 4.9. Presentasi Output

Setelah mempresentasikan pada mentor, saya juga mempresentasikan kepada kepala pusat penelitian. Dr Indra Pahlevi membenarkan kalau selama ini format working paper masih belum pernah diterbitkan oleh Puslit. Sejarahnya, parliamentary review yang mendekati model dari working paper. Namun Bapak Indra mengkritisi format penulisan dibawah judul yang mengganggu pembaca. Seharusnya itu tidak perlu untuk ditulis atau dimasukkan kedalam gambar working paper untuk memudahkan pembaca.



Gambar 4.10. Konsultasi akhir dengan Kepala Pusat Penelitian.

Tahapan kegiatan kelima ini memiliki keterkaitan dengan nilai nilai aneka diantaranya adalah;

Akuntabilitas	Mekanisme pelaporan yang berorientasi pada hasil (result oriented)
Nasionalisme	Siap sedia rela berkorban membela bangsa dan negara melalui KTI
Etika publik	meminta izin untuk mengajukan kegiatan pembimbingan
Manajemen ASN	pembimbingan dituangkan penyusunan presentasi dilaporkan pada koordinator bidang
Komitmen mutu	Pertanggungjawaban konsultasi dengan Koordinator dalam Memperbaiki kekurangan
Whole of government	Kolaborasi antar Lembaga dengan meninggalkan ego sektoral

Tabel. L. Nilai nilai kegiatan kelima

B. STAKEHOLDERS

Pihak-pihak yang terkait dalam pemanfaatan informasi artikel ilmiah *Working paper* untuk diplomasi parlemen, yaitu:

1. Biro kerjasama antar parlemen (BKSAP). Unit ini berperan dalam menyediakan agenda strategis

2. Pusat Penelitian. Peneliti sebagai penyedia data dan bahan ilmiah serta diseminasi.
3. Mentor. Mentor merupakan pembimbing dari penulis sehingga sangat berperan dalam penyelesaian aktualisasi kegiatan.

C. KENDALA DAN STRATEGI MENGATASI KENDALA

Kendala utama adalah mengatur jadwal dengan Biro KSAP dan Tenaga Ahli.

Strategi yang bisa dilaksanakan adalah;

1. Mengikuti jadwal rapat panja *Sustainable Development Goals*.
2. Berdiskusi dengan Tenaga Ahli yang tertarik dalam Isu tersebut.

D. ANALISA DAMPAK

1. ORGANISASI, UNIT, DAN INDIVIDU

Organisasi→ Kedepan diharapkan, terjadi sinergisitas karya karya ilmiah yang memberikan inovasi dalam memperjuangkan kepentingan nasional melalui diplomasi parlemen. Sebagai dampaknya, muncul sebuah produk diplomasi parlemen akan lebih terukur karena mendapat *feedback* dari masyarakat dan akademisi karena memiliki publikasi yang dapat diverifikasi secara ilmiah. Hal tersebut menjadi krusial, terutama dalam meningkatkan kualitas mutu dalam merespon semangat open parliament.

Unit→ Dengan menentukan isu yang dimaksud mampu memberikan kontribusi keterbukaan informasi bagi pihak umum serta meningkatkan daya saing peneliti di puslit dengan peneliti eksternal melalui jumlah sitasi. Menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya organisasi agar mampu bertukar informasi ilmiah.

Individu→ Selain itu, perlu memberikan ruang peneliti untuk lebih efektif berperan dalam diplomasi parlemen. Memberikan ruang peneliti untuk lebih efektif berperan dalam diplomasi parlemen. Menjadikan koordinasi yang baik antara peneliti, dan tenaga ahli untuk publikasi ilmiah yang mengandung unsur kebaruan (*novelty*).

2. ANEKA→ Aneka adalah nilai nilai dasar PNS dalam rangka penciptaan profesionalitas terdiri dari;

AKUNTABILITAS

“accountability is a relationship” menyatakan bahwa akuntabilitas berkaitan dengan menjaga hubungan dalam internal organisasi. Mekanisme diskusi dan pengkajian merupakan sebuah bentuk “pelaporan” dan membangun komunikasi sebagai unsur. Tahapan kegiatan yang disusun berdasarkan pada upaya sistematis untuk mendisiplinkan pertanggung jawaban hasil baik atau buruknya, berhasil atau gagal. Secara transparan dan konsisten, peneliti dituntut terbuka pada masukan serta tambahan.

NASIONALISME

Nasionalisme dalam pengertian negative adalah adanya kekhawatiran akan adanya musuh eksternal. Sedangkan nasionalisme yang diperjuangkan oleh diplomasi parlemen adalah nasionalisme dalam pengertian positif, yakni memperkuat cinta tanah air secara domestik. Kegiatan yang disusun selain dikemas dalam kerangka keilmuan yang obyektif, juga memiliki tujuan nasional sebagaimana Pancasila dan UUD 45.

ETIKA PUBLIK

Etika berbeda dengan etiket. Dalam prinsip etika, proses pembuatan harus didasari oleh niat yang tulus dalam melakukan penelitian dan pengkajian sehingga tidak menyinggung atau sensitif. Selain itu, juga membutuhkan analisa terhadap ekspektasi public yang menuntut hasil kinerja DPR agar lebih ramah public.

KOMITMEN MUTU

Prosedur yang kredibel dalam mengelola data dan informasi disertai dengan gototng royong dari banyak pihak menunjukkan upaya terintegrasi dalam menyusun karya ilmiah. Terlebih dalam menghadapi open parliament, maka kesiapsediaan peneliti untuk berinteraksi dengan representasi masyarakat dan kalangan akademisi. Untuk itu, peneliti membuat format baru yang mengandung unsur kebaruan sebagai bentuk inovasi demi efektivitas.

ANTI KORUPSI

Dalam upaya untuk menciptakan tata kelola penerbitan yang baik, maka independensi menjadi hal yang utama melebihi yang lain. Walaupun menyadur data data dilakukan melalui kecurangan yang soft, namun dengan komitmen, maka hal tersebut akan dilaksanakan.

E. JADWAL KEGIATAN

Tabel 4. Jadwal kegiatan

No	Tahapan kegiatan	Agustus				September				Oktober			
		week				week				week			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Menentukan isu												
	A. o Melaporkan hasil kepada Koordinator Bidang												
	B. o Membangun diskusi dengan BKSAP												
2	Mengumpulkan bahan topik penulisan												
	A. Berkonsultasi dengan koordinator bidang												
	B. Mencari informasi artikel ilmiah dan media sebagai bahan												
3	Berdialog dengan peneliti yang pakar di bidang isu tersebut												
	A. Berkonsultasi dengan koordinator bidang												
	B. Melakukan komunikasi dengan peneliti												
4	Berkoordinasi dengan BKSAP untuk mengadakan diskusi												

	A. Melakukan koordinasi dengan mentor dan perwakilan biro BKSAP																			
	B. Mempresentasikan bahan awal untuk ditambahkan atau direvisi secara Bersama sama																			
5	Konsultasi dengan pembimbing untuk presentasi hasil aktualisasi																			
	A. Konsultasi dengan Koordinator Bidang untuk mengajukan Pembimbingan presentasi																			
	B. Menghubungi peneliti bidang dan lintas bidang untuk mengikuti pembimbingan presentasi																			
	C. Melaporkan hasil kegiatan pada Koordinator Bidang																			

BAB V

KESIMPULAN

Sehubungan adanya kesalahan dalam penentuan proposal, maka terdapat problem dalam mengatur irama pekerjaan dengan BKSAP. Seharusnya, diskusi dengan Tenaga ahli dilakukan lebih dari dua kali untuk semakin memantapkan content. Menyusun waktu diskusi di awal dan di akhir akan mengganggu irama pekerjaan baik bagi peneliti maupun Biro Kerjasama Antar Parlemen.

Kesalahan juga terdapat ██████ saya dalam mengkomunikasikan gagasan dan melakukan pencatatan. Seharusnya ada waktu untuk mendiskusikan outline, sebelum content secara langsung. Saya juga seringkali melakukan konsultasi namun lupa saya catat baik saat berkonsultasi dengan mentor maupun dengan Tenaga Ahli BKSAP.

Namun demikian, kemitraan antara Tenaga Ahli dan BKSAP sejatinya sangat prospektif. Mengingat tantangan strategis kedepan adalah whole of governance dan open parliament, maka mental silo ego sectoral dapat dihilangkan. Terlebih diplomasi parlemen merupakan sebuah kebijakan berbasis riset

Saya secara pribadi menilai antara peneliti dan tenaga ahli tidak menunjukkan suatu sikap ego sectoral. Permasalahan utamanya adalah kegagalan saya dalam mensistematisasi tahapan tahapan. Selain itu, format two way communication yang jelas diantara peneliti dan tenaga ahli juga bisa terbentuk jika ada pembagian tugas diantara keduanya.

SARAN

Walaupun idealnya merupakan tugas saya pribadi sebagai peneliti, namun membuat working paper bukanlah pekerjaan mudah. Untuk menyusun

satu working paper dibutuhkan waktu minimal dua bulan. Selain itu, format yang terlalu jarang sering membuat orang menganggap hanya sebatas makalah pada umumnya.

Dalam hal pembagian tugas, jika satu karta tulis ilmiah dikoreksi oleh beberapa orang, tentu akan revisi dalam jumlah yang berkali kali juga. Dengan mengerjakan secara berkelompok, beban peneliti tentu akan berkurang. Secara ideal, grup whatsapp antara peneliti dan Tenaga Ahli perlu untuk dibuat agar dinamika kemitraan working paper.

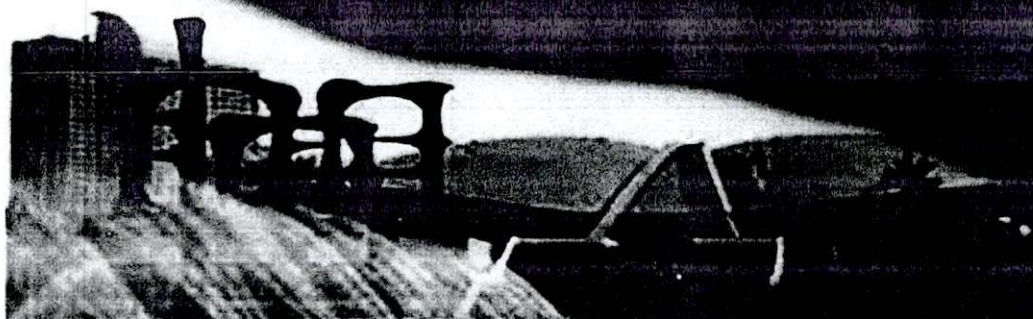
LAMPIRAN



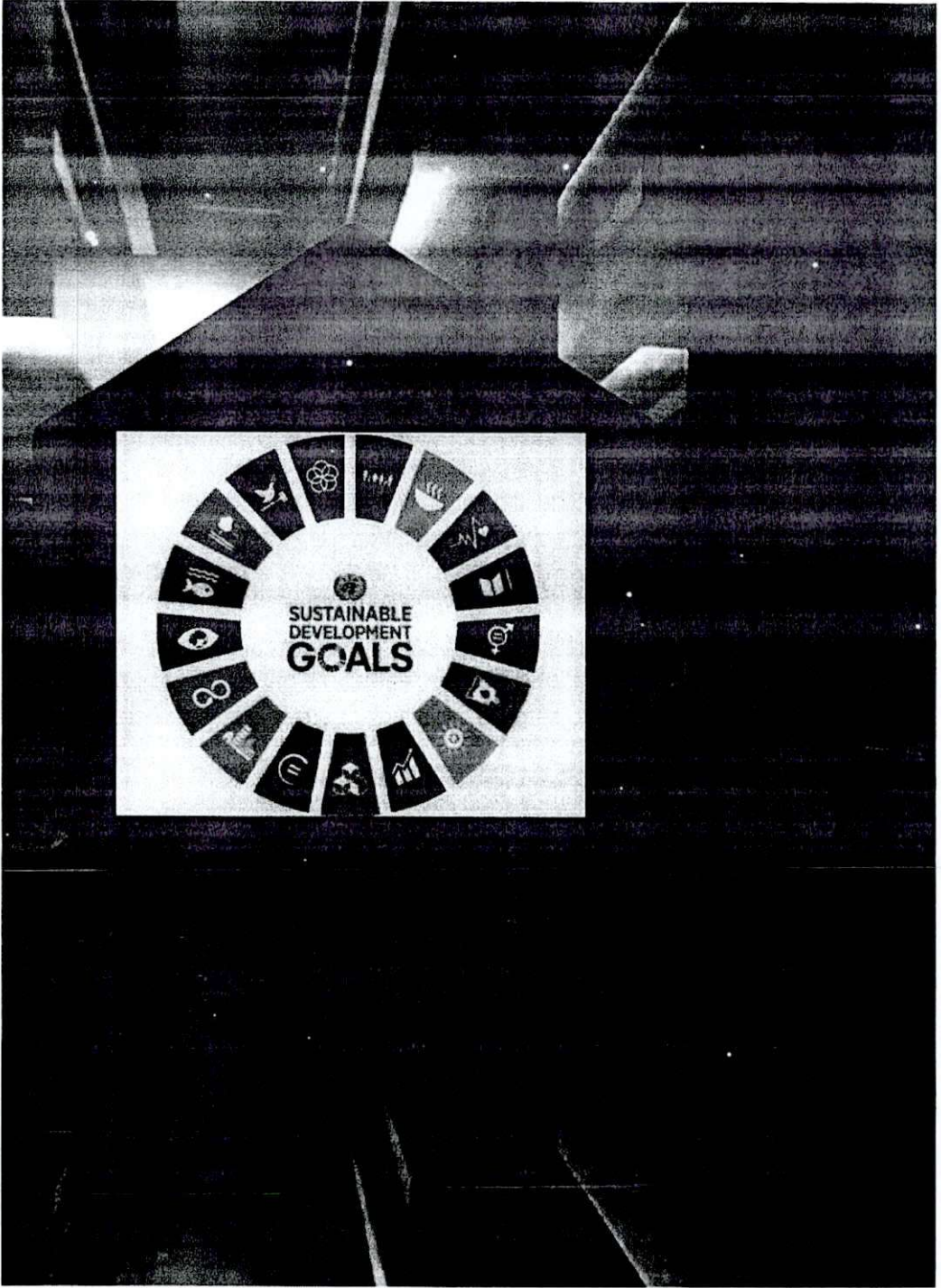
WORKING

**"SKEMA FINANSIAL INKLUSIF
DALAM RANGKA TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN"**

Ziyad Falahii | Oktober 2019



**PUSAT PENELITIAN
BADAN KEAHLIAN DPR RI**



WORKING PAPER
SKEMA FINANSIAL INKLUSIF DALAM RANGKA TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Peneliti Hubungan Internasional dan Biro Kerjasama Antar Parlemen

Abstrak

Tulisan ini mencoba mengelaborasi bagaimana prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sedang beradaptasi dengan kebijakan finansial inklusif yang akan dijalankan pemerintah. Sekalipun Visi TPB yang telah dituangkan berupa roadmap oleh beberapa kementerian dan Lembaga non kementerian di Indonesia telah terealisasi. Namun, esensi utama (TPB) dalam rangka pengentasan kemiskinan masih perlu banyak hal yang dibenahi. Secara makrofinansial, dinamika global yang turbulen memberikan *shocktherapy* pada *great powers* menjadi tantangan eksternal Indonesia. Secara administrative, upaya integrasi nasional dengan pembiayaan infrastruktur yang memiliki banyak problem di pedesaan menjadi pekerjaan rumah yang besar dalam membawa skema finansial inklusif secara signifikan menjadi alat pemercepat TPB.

Kata Kunci: Finansial Inklusif, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Infrastruktur dan masyarakat partisipatif.

LATAR BELAKANG

Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa keuangan (OJK) memiliki agenda finansial inklusif sebagai hasil pertemuan G-20 tahun 2008. Belajar dari krisis subprime mortgage yang terjadi di AS lebih karena kurangnya integrasi sektor finansial perbankan terhadap sector mikro. Untuk itu, BI dan OJK mencoba mengantisipasi hal tersebut dengan menargetkan 75% seluruh masyarakat Indonesia, termasuk penduduk diluar wilayah urban memiliki akses ke perbankan.

Namun realisasi sampai bulan agustus 2019 masih sekitar 50% masyarakat yang terintegrasi kedalam sector keuangan. Terlebih Undang Undang tentang perlindungan data pribadi juga belum menjadi agenda pembahasan yang serius. Sebuah fenomena yang menunjukkan bagaimana rezim teknologi yang berkembang terlalu pesat, sehingga hukum yang ada belum mampu mengantisipasi. Terlebih sector finansial mengandung resiko default mengingat Indonesia menganut rezim devisa bebas.

Internasional Monetary Fund telah memberikan *early warning* bagi negara anggota, khususnya kepada negara Asia untuk bersiap melakukan konsolidasi fiskal. Tentu ini dapat menjadi indikator adanya *rush* meskipun sejatinya *default* tidak bisa diprediksi sebagaimana kasus yang menimpa Yunani. Apalagi jika ditelusuri lebih dalam, ekonomi dunia juga tengah dihadapkan pada krisis energi dan krisis pangan. Bahkan, fluktuasi harga minyak dunia turut mendorong dollar untuk terus menguat, dan mata uang negara lain melemah. Di sisi lain, bahan baku industri menjadi semakin mahal sehingga *cost production* untuk infrastruktur juga meningkat. Artinya, produktivitas di seluruh negara sekarang ini sedang menurun dan pertumbuhan ekonomi secara umum sedang melamban. Dengan kata lain, mempercepat pembangunan infrastruktur sangat sulit dilakukan.

Selain Yunani, Tiongkok menjadi contoh bagaimana *krisis* terjadi akibat ekspektasi berlebihan atas infrastruktur. Meskipun pembangunan infratsruktur berjalan dengan cepat, namun tidak sepenuhnya diserap oleh pasar (*underconsumption*). Sehingga banyaknya proyek properti yang mubajir di Tiongkok juga dapat berdampak masif ke sektor keuangan dunia karena tingkat hutang luar negeri tiongkok yang tertinggi di Asia. Dengan begitu, maka *Asian Investment Infrastructure Bank* (AIIB) sesungguhnya lebih menguntungkan Tiongkok, daripada Indonesia. Terlebih barang barang kebutuhan dasar infrastruktur seperti kawat dan paku adalah produk Impor buatan Tiongkok.

Seperti berlayar ditengah ombak, maka mempercepat infrastruktur dengan hutang memiliki konsekuensi. Justru sebaliknya, Indonesia dituntut memacu

industrialisasi domestik guna mendorong akumulasi profit lebih cepat untuk segera melakukan pembayaran hutang luar negeri. Seharusnya krisis Yunani memberi pelajaran bahwasanya tingginya *bubble* berpotensi menghasilkan default jika tidak diimbangi dengan percepatan pembangunan sektor riil. Inilah yang menjadi alasan Rakyat Yunani untuk menolak hutang dari lembaga donor, meskipun jumlah nominalnya tidak terlalu besar jika dibandingkan Indonesia. Yunani percaya bahwa hutang luar negeri tidak akan menyelesaikan masalah justru memperkeruh masalah. Melalui referendum, telah diputuskan mayoritas rakyat menolak, maka Yunani berpotensi keluar dari *Eurozone*.

Secara teoritis, hutang infrastruktur diyakini pemerintah sebagai cara yang pas untuk mensesiasati celah fiskal. Untuk menutupi kekurangan dalam pembiayaan proyek tersebut, muncul gagasan untuk Penyertaan Modal Negara ke BUMN dan mengalihkan dana pensiun, Taspen, ASABRI, dana haji untuk pembangunan infrastruktur. Namun turunya nilai Rupiah, dan meningkatnya utang luar negeri terutama utang swasta sejak awal tahun 2015, menunjukkan kondisi moneter Indonesia yang amat rentan. Sehingga, apakah pembangunan infrastruktur benar benar mampu meningkatkan perekonomian, atau justru sebaliknya?.

PEMBAHASAN

LANDSCAPE MAKROFINANSIAL GLOBAL

Secara umum, ekspektasi investasi dan lalu lintas devisa di wilayah Asia pasifik cukup baik. Sebagai episentrum perekonomian saat ini, Asia pasifik memiliki pertumbuhan *Gross domestic product* (GDP) terbesar di dunia. Bahkan AS fokus pada region Asia Pasifik bukan hanya untuk merespon kondisi krisis ekonomi domestik semata, tetapi sekaligus upaya pembendungan (*containment*) terhadap Tiongkok. Namun, tingkat pertumbuhan ekonomi Asia Pasifik, khususnya ASEAN, sejatinya masih tergantung oleh eksistensi dua raksasa AS dan Tiongkok.

Perang ekonomi dua raksasa membuat FDI dari kedua negara besar tersebut mendominasi di ASEAN. Serangkaian data tersebut menunjukkan bahwa kemitraan dengan *Asian Investment Infrastructure Bank* akan lebih menguntungkan Tiongkok. Terlebih barang-barang kebutuhan dasar infrastruktur seperti kawat dan paku adalah produk impor buatan Tiongkok. Tiongkok akan semakin diuntungkan dengan ongkos produksi murah, dimana UMR masih bergerak pada angka 2,5 jutaan. Dengan kata lain, utang luar negeri Tiongkok beserta bunganya dapat dibayar dengan kerjasama infrastruktur dengan Indonesia.

Bagaimana memetakan secara teoritik kapan dan dimana krisis finansial menjadi kelemahan para ekonom. Hal tersebut karena sistem finansial global yang sulit untuk diprediksi mengingat pasar keuangan dan derivative menganut asas devisa bebas. Orlando Leiva memperlihatkan jika sampai saat ini ilmu ekonomi masih dalam upaya untuk mencari semacam teori universal. Teori ibarat sebuah pisau yang berfungsi untuk memilah-milah sebuah fenomena sosial yang memiliki konteks ruang dan waktu. Hal tersebut berimplikasi terhadap kepakeman sebuah teori ekonomi yang selama ini terbatas pada kedaulatan nasional suatu negara. Teori tersebut seringkali terjebak dalam falsifikasi partikularistik, sehingga tidak ada teori yang betul-betul menjelaskan perekonomian dunia secara keseluruhan. Implikasinya, teori ekonomi yang masih terkotakkan dalam sekat-sekat kedaulatan menambah ambiguitas pemakaian konsep "world Economy" dan gagal menjelaskan secara komprehensif krisis Amerika Latin tahun 1980an dan krisis Asia 1997.

Leiva menguraikan bagaimana trend hegemoni Amerika dari masa ke masa mengalami peningkatan tanpa pernah diprediksi oleh AS sendiri. Dilihat dari segi komoditas, Leiva mengasumsikan kekuatan ekonomi AS malah terletak pada sektor finansial yang menguasai sepuluh persen GDP dan meningkat menjadi dua puluh persen pasca perang dingin. Jika dirunut secara statistik, perkembangan *multi national corporation* AS meroket dimulai sejak tahun 1970an dan terus meroket pasca perang dingin berakhir..

Leiva menyatakan bahwa ada tiga esensi kebijakan *new national security policy* AS pasca perang dingin. Pertama, adalah fakta bahwa AS adalah yang terkuat secara militer sehingga harus senantiasa waspada terhadap ancaman dari entitas lain. Kedua, AS bersiap untuk melakukan preemptive bagi kedaulatan lain jika diindikasikan mengancam AS. Ketiga, adalah perlindungan warga sipil AS dari yurisprudensi *International Criminal courts* (ICC). Ketiga kebijakan keamanan tersebut memberikan nuansa baru tentang bagaimana agenda AS bukanlah agenda yang hanya berkaitan dengan kepentingan domestik, melainkan juga kepentingan nasional. Ketiga Point penting dalam *new national security* tersebut memperlihatkan bahwa isu ekonomi sendiri merupakan salah satu bagian dalam keamanan.

Melirik realitas yang terjadi dalam lima puluh tahun terakhir, ekspansi sector finansial dollar AS seolah menjadi episentrum dalam perekonomian global. Namun identifikasi perekonomian global sebagai proyek Amerikanisasi kini menjadi sebuah asumsi yang menuai perdebatan setelah menyadari munculnya kekuatan baru dalam perekonomian digital, semisal bitcoin. Bahkan Fareed Zakaria mengungkapkan bahwa ekonomi global kontemporer sedang menuju pada masa *post-america world*.

DINAMIKA MIKROFINANSIAL DAN POTENSI RESIKONYA

Presiden Jokowi memerlukan solusi guna mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih jauh dibawah target. Oleh karena itulah, Jokowi berkomitmen menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan nasional. Namun seperti kita ketahui, dana alokasi APBN Indonesia untuk sektor infrastruktur masih tergolong minim jika dibandingkan dengan subsidi energi dan belanja rumah tangga kementerian.

Tak heran, banyak dorongan baik dari dalam maupun luar negeri supaya pemerintahan Indonesia menjalin kemitraan dengan negara lain, khusus untuk bidang infrastruktur. Gejala tersebut direspon Jokowi dan Xi Jin Ping dengan rencana pembuatan *Asean Investment Infrastructure Bank* (AIIB) yang diharapkan menjadi

jalan alternatif kerjasama ditengah ketergantungan Indonesia pada Asian Development Bank (ADB) dan World Bank (WB).

Sebaliknya, Infrastruktur Tiongkok sejatinya sedang mengalami apa yang disebut *infrastructure bubble*. Tingginya *demand* dalam kredit infrastruktur berpotensi mengurangi daya beli masyarakat (*underconsumption*). Sehingga pasar infrastruktur dalam negeri Tiongkok yang stagnan mendorong Tiongkok untuk harus mencari pasar infrastruktur baru kenegara berkembang yang memiliki sumber daya manusia sumber daya alam yang potensial. Indonesia, dengan kualitas SDM yang kurang, dan minimnya industri dasar seperti kawat dan paku, secara hitungan matematis akan menyumbang aliran *capital outflow* sangat besar untuk pendapatan Tiongkok menyelamatkannya dari resiko *default*

Dengan kata lain, investasi besar Tiongkok adalah strategi *shifting risk* (menggeser resiko) *bubble* infrastruktur ke Indonesia. Resiko dibalik pertumbuhan ekonomi Tiongkok amat tinggi karena Tingkat GDP Tiongkok yang tinggi sejatinya ditopang oleh Utang Luar negeri. Jangan lupa cadangan devisa Tiongkok yang terbesar masih didominasi Dollar AS. Dapat diasumsikan, Moneter Tiongkok juga tengah mengalami *currency war* dengan dollar AS yang diprediksi semakin sengit setelah *Default* Yunani menurunkan nilai Yuan, tapi malah meningkatkan Dollar AS. Dalam situasi ekonomi tak pasti tersebut, Tiongkok akan tetap berusaha mempertahankan laut Cina Selatan dari AS. Sebaliknya, AS sedang gencarnya mencari obat kuat untuk mengatasi penurunan GDP AS sejak 2008.

Di sisi lain, pasar infrastruktur Indonesia bisa dikatakan juga sedang tidak stabil. Ketidakpastian pengerjaan proyek menciptakan kerugian bagi keuangan Indonesia karena pemerintah Indonesia harus membayar *Commment fee*. Begitu juga ekspektasi yang besar pada *property* sebagai *safe heaven* berimplikasi pada harga rumah dan bunga kredit Bank Tabungan Negara (BTN) yang dinaikkan pada awal 2015. I

Implikasinya, potensi kasus *non performing loan* meningkat, namun pembangunan perumahan oleh pengembang justru semakin intensif untuk menekan

biaya produksi. Tanpa disadari, prakondisi Indonesia dan Tiongkok sekarang mirip dengan AS tahun 2008 akibat tingginya utang akibat *Property Bubble* yang berujung krisis *Supreme Mortgage*. Oleh karena itu, Indonesia perlu waspada karena tingginya investasi Tiongkok berpotensi “rush” jika tidak diimbangi oleh produktivitas tinggi untuk meningkatkan pendapatan negara. Masalahnya, kenaikan harga BBM membuat biaya produksi naik, daya beli masyarakat menurun, dan diperparah dengan belum stabilnya nilai rupiah menunjukkan kompleksitas permasalahan.

Bank dunia dan ADB menyepakati public procurement sebagai asas yang harus dipakai Indonesia agar tidak lagi terdampak krisis seperti sebelumnya. Public procurement (belanja barang public) secara lebih aplikatif tertuang dalam program e-government dan e-budgeting. Darisini, mekanisme pengawasan sangat terfokus pada kasus pengadaan barang dan jasa sebagai zona yang banyak celah. Hingga kemudian pemerintah mengesahkan LKPP sebagai instansi yang mengurus kasus pengadaan.

PENUTUP

KEBUTUHAN AKAN MASYARAKAT PARTISIPATIF

Sebagai konsekuensi dari perubahan lingkungan strategis sebagaimana pada sub bab sebelumnya wilayah desa khususnya akan mengalami modernisasi penggunaan teknologi menyongsong program finansial inklusif diatas. Sedangkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, masyarakat partisipatif (inklusif) sebagaimana Poin enam belas adalah bagian penting dalam kemitraan.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas menjadi pertanyaan besar dalam skema finansial inklusif di wilayah yang belum terjangkau teknologi pengawasan, seperti desa. Cara sosialisasi dan pelatihan yang terkesan top down kurang maksimal dalam membina masyarakat untuk lebih akuntabel. Untuk mengatasinya, Mekanisme reward “people of the month” bisa ditrapkan tiap bulan untuk memotivasi ASN. Bagaimanapun, rasa cinta tanah air dapat dibangkitkan jika memiliki pengalaman historis.

Beberapa rekomendasi dari Bank Dunia dan Asian Development Bank juga berkontribusi terkait hasil program kemitraan pembangunan infrastruktur desa melalui program PNPM. Eksistensi Program PNPM tersebut sempat menjadi pertimbangan tentang perlunya dana desa, karena memang program pembangunan selama ini cenderung APBD sentris. Namun setelah dana desa disetujui, tuntutan transparansi dan akuntabilitas tentu akan mengalami dinamika yang pesat.

Spirit masyarakat partisipatif dalam pembangunan menemukan momentumnya secara internasional saat PBB mengeluarkan program *millennium development goals* (MDGs) di awal 2000an. Dalam era Sustainable Development Goals, partisipasi dan suara masyarakat menjadi salah satu alat ukur legitimasi institusi publik. Sehingga mekanisme tata kelola birokrasi tidak lagi Top-down, melainkan bottom up. Keterbukaan semakin hari semakin menjadi prasyarat bagi alat ukur kualifikasi institusi publik.

Peranan organisasi internasional tidak bisa dilepaskan dalam upaya institusionalisasi reformasi birokrasi yang menempatkan masyarakat sebagai subyek. Pasca amandemen UUD 45 tepatnya pada tahun 2004, Bank Dunia mengeluarkan paket kebijakan *development policy loan*. Tidak ketinggalan, Asian Development Bank (ADB) juga merilis paket kebijakan *Development Policy Support Programme*. Titik tekan (stressing point) keduanya adalah melakukan evaluasi terhadap beberapa kebijakan yang tidak efisien sehingga berdampak makroekonomi. Persoalan mikroekonomi masih dikesampingkan karena konteks pada masa tersebut adalah upaya recovery Indonesia dari krisis moneter 1998

Akuntabilitas individu aparatur negara hingga akuntabilitas stakeholder berpotensi untuk optimal jika akuntabilitas personal telah mumpuni. Bahkan peran Akuntabilitas sebagai kontrol demokratis telah berkembang dengan luas di Indonesia dengan kehadiran berbagai *Non Governmental Organization* (NGO). Tidak ketinggalan peran konstitusional yang semakin kuat dengan semakin ekstensifnya beraneka Lembaga penegak hukum belum menjadi driving force bagi upaya menanamkan nilai nilai akuntabilitas.

Accountability requires reporting yang bermakna bahwa setiap aparat perlu melakukan pelaporan tidak cukup diterapkan dalam upaya menjaga relationship dalam pembangunan. Hal tersebut karena masyarakat, khususnya desa belum memiliki knowledge yang mumpuni untuk menginterpretasikan apalagi mengkritisi laporan dari aparat desa. Sistem social gemeinschaft yang masih eksis di desa juga berpotensi untuk melakukan fraud secara terorganisir.

Belum lagi masih lestarnya feodalisme, yang memungkinkan peran tokoh untuk memanfaatkan dana tanpa laporan melalui rasionalisasi dan pembenaran bisa menjadi sebuah mekanisme kultural yang soft namun bias, yang bisa disepakati masyarakat desa tanpa berdasarkan alasan dan ukuran yang jelas. Hal tersebut merupakan indikator tidak mudahnya untuk membawa asas transparansi dan integritas secara tiba tiba ke penduduk desa.

Dualisme otoritas antara kementerian desa dengan kementerian dalam negeri yang menyebabkan Ketidakpastian politik di tingkat pusat merupakan kerugian bagi warga desa yang sebentar lagi akan menghadapi persaingan ASEAN Community 2015. Bahkan adanya dugaan anggaran desa tersebut berpotensi dimainkan sebagai alat politik dalam pilkada. Padahal, jika desa mampu memproduksi secara mandiri tentu akan berdampak positif kepada keuangan Indonesia.

Dengan semakin tingginya *cost production* negara maju, maka produk Indonesia dapat bersaing secara Internasional. Dengan kata lain, masyarakat partisipatif dapat tampil sebagai aktor perekonomian global jika pemerintah pusat mampu merealisasikan rencana anggaran untuk desa secara prudent. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi riil di Desa meskipun dalam skala kecil, namun lebih aman dalam meningkatkan pertumbuhan GDP Indonesia. Anggaran desa sebaiknya tidak dipandang sebagai subsidi yang merugikan keuangan negara, tetapi merupakan investasi jangka panjang Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Fareed Zakaria., 2008. *The Post-American World*. New York: Norton Company.
Joseph Stiglitz. 2009. *Freefall: America, Free market and the sinking of global economy*. New York: Norton Company.

JURNAL

- Leiva, Orlando, 1997. *The world economy and the united states and the beginning of twenti-first century*. Latin america perspectives, vol 34, no.1 (Januari, 2007), Sage publication.

DOKUMEN LEMBAGA

- World Bank. Program document, on a proposed loan, in amount of \$300 million to the republic of Indonesia for a first development policy loan, Bank Dunia, 2004.

- Asian Development Bank, Program document, Development Policy Support Programme, 2005.